



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Provinsi Kepulauan Riau

2023



AKIP

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring  
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar  
Pulau Dompak Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos 29124  
Email : [blhkepri@yahoo.com](mailto:blhkepri@yahoo.com) Website : <https://dlhk.kepriprov.go.id>

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, dapat diselesaikan tepat waktu. (LKjIP) ini merupakan upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang mengarah pada layanan yang professional dan kompeten.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 ini disusun dalam rangka memenuhi :

1. Peraturan Presiden 29 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggung jawaban kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2023, sebagai konsistensi atas komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Sebagai bagian dari pertanggung jawaban, Laporan Kinerja ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang mendukung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran

yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Tentu Kami menyadari bahwa laporan ini belumlah sempurna dalam menyajikan prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan serta peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Februari 2024

KEPALA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| Ikhtisar Eksekutif.....   | i         |
| Kata Pengantar .....  | ii        |
| Daftar Isi .....  | iii       |
| Daftar Tabel.....   | iv        |
| Daftar Gambar .....   | v         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1         |
| 1.2 Maksud dan Tujuan .....   | 2         |
| 1.3 Landasan Hukum .....  | 2         |
| 1.4 Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau ..... | 5         |
| 1.5 Sumber Daya Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau .....                    | 8         |
| 1.6 Isu Strategis .....   | 14        |
| 1.7 Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) .....                  | 16        |
| <b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>   | <b>19</b> |
| 2.1 Rencana Program Kegiatan dan indikator kinerja .....  | 19        |
| 2.2 Perjanjian Kinerja DLHK Provinsi Kepulauan Riau .....   | 24        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>  | <b>29</b> |
| 3.1 Capaian Kinerja .....   | 30        |
| 3.2 Realisasi Anggaran .....  | 48        |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>  | <b>75</b> |
| <b>L A M P I R A N .....</b>  | <b>77</b> |

## DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023 .....       | 8  |
| Tabel 1.2 | Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurut golongan dan jenis kelamin Tahun 2023                             | 9  |
| Tabel 1.3 | Aset Inventaris Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau .....                                  | 10 |
| Tabel 1.4 | Permasalahan Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan   | 15 |
| Tabel 2.1 | Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....   | 21 |
| Tabel 2.2 | Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.....                               | 24 |
| Tabel 2.3 | Program dan Anggaran Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau .....                            | 24 |
| Tabel 2.4 | Perjanjian Kinerja pejabat Eselon III Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan RiauTahun 2023 .....            | 25 |
| Tabel 2.5 | Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau .....                                    | 26 |
| Tabel 2.6 | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023.....  | 27 |
| Tabel 3.1 | Skala pengukuran.....   | 30 |
| Tabel 3.2 | Evaluasi Pencapaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....   | 30 |
| Tabel 3.3 | Indikator dan Parameter IKLH.....   | 33 |
| Tabel 3.4 | Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 s/d 2023..... | 34 |
| Tabel 3.5 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.....            | 36 |
| Tabel 3.6 | Evaluasi pencapaian sasaran 5 (lima) tahun berjakan dengan tahun sebelumnya.....  | 46 |
| Tabel 3.7 | Realisasi Anggaran.....   | 48 |
| Tabel 3.8 | Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Program   | 64 |
| Tabel 3.9 | Realisasi anggaran per Sasaran.....   | 65 |

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau 8

.....

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota), wajib menyelenggarakan kepemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur guna senantiasa membangun akuntabilitas sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlangsung dengan bijaksana, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang bersih dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme.

Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi dan dalam PermenPAN Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini akan memberikan gambaran pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam satu tahun anggaran beserta dengan hasil capaian indikator kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau didasarkan pada Permenpan Nomor 53 tahun 2014 sebagai pelaporan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai sasaran Program yang wajib dipenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023.

Tujuan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri untuk meningkatkan kinerjanya.

## **1.3. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
15. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun

- 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 49);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
  21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

#### **1.4. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki kedudukan sebagai Perangkat Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang melingkupi urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Adapun fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau diantaranya sebagai berikut :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan perencanaan dan program di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kajian dampak lingkungan;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang konservasi, pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang tata kelola kehutanan dan pemanfaatan hasil hutan;
- g. pengkoordinasian kebijakan teknis dengan instansi terkait; dan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

Berdasarkan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :

- 1. Sekretariat;
- 2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan;
- 4. Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 5. Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- 6. UPTD Laboratorium Lingkungan;
- 7. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit I Karimun;
- 8. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Unit II Batam;
- 9. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit III Lingga;
- 10. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit IV Bintan -Tanjungpinang;
- 11. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit V Natuna;
- 12. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit VI Anambas;
- 13. Kelompok Jabatan Fungsional.



## **1.5. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki pegawai dengan 3 kelompok yaitu Pegawai Negeri SIPil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas atau THL. Jumlah keseluruhan pegawai yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 185 pegawai. Jumlah pegawai tersebut terdiri dari pejabat eselon sebanyak 34 orang, staf PNS sebanyak 131 orang, staf PTT sebanyak 18 orang dan staf THL sebanyak 36 orang.

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, memiliki tingkat pendidikan yang beragam, mulai tingkat pendidikan terendah (SMA) hingga tertinggi (S3).

**Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023**

| No | Tingkat Pendidikan | PNS | PTT | THL | Jumlah |
|----|--------------------|-----|-----|-----|--------|
| 1  | S3                 | -   | -   | -   | -      |
| 2  | S2                 | 15  | -   | 0   | 15     |
| 3  | S1                 | 61  | 12  | 11  | 84     |
| 4  | D4                 | -   | -   | -   | -      |
| 5  | D3                 | 6   | 1   | 4   | 11     |
| 6  | D2                 | -   | -   | -   | -      |
| 7  | D1                 | -   | -   | -   | -      |
| 8  | SMA                | 49  | 5   | 16  | 70     |
| 9  | SMP                | -   | -   | 2   | 2      |
| 10 | SD                 | -   | -   | 3   | 3      |
|    | Jumlah Total       | 131 | 18  | 36  | 185    |

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau*

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai golongan yang bervariasi dari Golongan II sampai dengan Golongan IV seperti disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurut golongan dan jenis kelamin Tahun 2023**

| No        | Pangkat/ Golongan          | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|-----------|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| <b>1</b>  | Pembina Utama ( IV/e)      | -         | -         | -      |
| <b>2</b>  | Pembina Utama Madya (IV/d) | -         | -         | -      |
| <b>3</b>  | Pembina Utama Muda (IV/c)  | -         | -         | -      |
| <b>4</b>  | Pembina Tk. I (IV/b)       | 4         | -         | 4      |
| <b>5</b>  | Pembina (IV/a)             | 9         | -         | 9      |
| <b>6</b>  | Penata Tk. I (III/d)       | 27        | 15        | 42     |
| <b>7</b>  | Penata (III/c)             | 8         | 5         | 13     |
| <b>8</b>  | Penata Muda Tk. I (III/b)  | 6         | 4         | 10     |
| <b>9</b>  | Penata Muda (III/a)        | 10        | 4         | 14     |
| <b>10</b> | Pengatur Tk. I (II/d)      | 30        | 3         | 33     |
| <b>11</b> | Pengatur (II/c)            | 4         | 1         | 1      |
| <b>12</b> | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | -         | -         | -      |
| <b>13</b> | Pengatur Muda (II/a)       | 1         | -         | 1      |
| <b>14</b> | Juru Tk. I (I/d)           | -         |           |        |
| <b>15</b> | Juru (I/c)                 | -         |           |        |
| <b>16</b> | Juru Muda Tk. I (I/b)      | -         |           |        |
| <b>17</b> | Juru Muda (I/a)            | -         |           |        |
|           | Jumlah Total               | 99        | 32        | 131    |

## **2. Sarana dan Prasarana**

Berikut ini adalah daftar aset inventaris yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka penunjang operasional kedinasan.

Tabel 1.3. Aset Inventaris Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

| No | Nama Barang                                     | Jumlah Unit |
|----|---|-------------|
| 1  | AAS Attachment for HG Determination and 16 Lamp | 1           |
| 2  | AC Split  | 4           |
| 3  | AC Unit   | 9           |
| 4  | Air Conditioning Unit                           | 7           |
| 5  | Alat Dapur Lain-lain                            | 30          |
| 6  | Alat Destilasi Air                              | 1           |
| 7  | Alat Lab. Kimia Lain-Lain                       | 1           |
| 8  | Alat Lab. Kualitas Air & Tanah Lain-lain        | 4           |
| 9  | Alat Lab. Kualitas Udara Lain-lain              | 4           |
| 10 | Alat Lab. Lingkungan Lain-lain                  | 69          |
| 11 | Alat Pembantu Pemadam Kebakaran                 | 55          |
| 12 | Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain                | 35          |
| 13 | Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain             | 1           |
| 14 | Alat Pendingin Lain-lain                        | 2           |
| 15 | Alat Penggilingan Padi                          | 1           |
| 16 | Alat Penghancur Kertas                          | 1           |
| 17 | Alat Pengukur PH Tanah (Soil Tester)            | 2           |
| 18 | Alat Penyimpanan Lain-lain                      | 1           |
| 19 | Alat Peraga Bahasa Indonesia Lain-lain          | 1           |
| 20 | Alat Perlindungan Lain-lain                     | 61          |
| 21 | Alat Rumah Tangga Lain-lain                     | 6           |
| 22 | Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)                   | 1           |
| 23 | Amplifier                                       | 1           |
| 24 | Anemometer                                      | 1           |
| 25 | Anemometer Portable Digital                     | 1           |
| 26 | Audio Tape Reel Recorder                        | 1           |
| 27 | Automatic Timer                                 | 1           |
| 28 | Bangunan Gedung Kantor Permanen                 | 2           |
| 29 | Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain          | 1           |
| 30 | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen   | 1           |
| 31 | Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain        | 1           |
| 32 | Bangunan Tempat Kerja Lain-lain                 | 1           |
| 33 | Beaker  | 1           |
| 34 | Botol   | 100         |
| 35 | Botol Pencuci                                   | 1           |

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 36 | Botol Plastik                                | 20  |
| 37 | Buku Matematika & Pengetahuan Alam Lain-lain | 1   |
| 38 | Buku Umum Lain-lain                          | 6   |
| 39 | Burette                                      | 22  |
| 40 | Camera + Attachment                          | 4   |
| 41 | Camera Electronic                            | 15  |
| 42 | Camera Photo Micrograph                      | 1   |
| 43 | Camera Video                                 | 2   |
| 44 | Cardiac Output                               | 110 |
| 45 | Cawan Petri                                  | 20  |
| 46 | Cawan Porselin                               | 20  |
| 47 | CCTV   | 8   |
| 48 | Conductimeter                                | 3   |
| 49 | Conductivity Meter                           | 3   |
| 50 | Container                                    |     |
| 51 | CPU  | 2   |
| 52 | Daun Pintu Alumunium                         | 5   |
| 53 | Dinding/Sekat Besi                           | 2   |
| 54 | Dinding/Sekat Gypsum                         | 1   |
| 55 | Dinding/Sekat Kayu                           | 238 |
| 56 | DO Meter                                     | 8   |
| 57 | Dry Type Gas Meter                           | 1   |
| 58 | Dump Truck                                   | 6   |
| 59 | Elektroda Tembaga (Voltameter)               | 6   |
| 60 | Emergency Kit                                | 1   |
| 61 | Ensylopedia, Kamus, Buku Referensi           | 14  |
| 62 | Erlenmeyer Plastik                           | 26  |
| 63 | Exhaust Fan                                  | 4   |
| 64 | Filling Besi/Metal                           | 21  |
| 65 | Filter                                       | 3   |
| 66 | Filtration Unit                              | 1   |
| 67 | Garu   | 18  |
| 68 | Gas Sampler                                  | 2   |
| 69 | Gedung Pos Jaga Termanen                     | 7   |
| 70 | Global Positioning System (GPS)              | 37  |
| 71 | Gordyn                                       | 3   |
| 72 | Handphone                                    | 2   |
| 73 | Handy Talky                                  | 2   |
| 74 | Handycam                                     | 2   |
| 75 | Harddisk Internal                            | 4   |
| 76 | High Volum Air Sampler                       | 1   |
| 77 | Hot Plate Stirrer                            | 1   |
| 78 | Hub  | 3   |
| 79 | Ilmu Pengetahuan umum                        | 165 |
| 80 | Instrument Probe/Sensor Lain-lain            | 2   |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 81  | Instrument Tray                                | 5  |
| 82  | Jeep   | 1  |
| 83  | Kabel Listril                                  | 2  |
| 84  | Kaca Riben                                     | 5  |
| 85  | Karpet   | 3  |
| 86  | Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain      | 3  |
| 87  | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain             | 3  |
| 88  | Keyboard                                       | 1  |
| 89  | Kom pas  | 10 |
| 90  | Konstruksi Pagar                               | 1  |
| 91  | Kursi Biasa                                    | 31 |
| 92  | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II | 2  |
| 93  | Kursi Kerja                                    | 65 |
| 94  | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural             | 8  |
| 95  | Kursi Kerja Pejabat Eselon II                  | 1  |
| 96  | Kursi Kerja Pejabat Eselon III                 | 2  |
| 97  | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV                  | 9  |
| 98  | Kursi Kerja Pejabat Lain-lain                  | 9  |
| 99  | Kursi Rapat                                    | 58 |
| 100 | Kursi Rapat Pejabat Lain-lain                  | 30 |
| 101 | Kursi Tamu                                     | 1  |
| 102 | Labu Taka r                                    | 23 |
| 103 | Lain-lain                                      | 1  |
| 104 | Lap Top  | 35 |
| 105 | Layar Proyektor                                | 3  |
| 106 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis               | 13 |
| 107 | Lemari Asam                                    | 1  |
| 108 | Lemari Besi                                    | 1  |
| 109 | Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain             | 3  |
| 110 | Lemari Es                                      | 9  |
| 111 | Lemari Kayu                                    | 1  |
| 112 | Lemari Pakaian                                 | 1  |
| 113 | Lemari Penyimpanan                             | 18 |
| 114 | Loudspeaker                                    | 2  |
| 115 | Magnetic Stripes & Bars                        | 6  |
| 116 | Masker Oksigen                                 | 15 |
| 117 | Meja Besi/Metal                                | 15 |
| 118 | Meja Biro                                      | 16 |
| 119 | Meja Kayu/Rotan                                | 37 |
| 120 | Meja Kerja                                     | 21 |
| 121 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural              | 7  |
| 122 | Meja Kerja Pejabat Eselon III                  | 1  |
| 123 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV                   | 6  |
| 124 | Meja Kerja Pejabat Lain-lain                   | 8  |
| 125 | Meja Makan                                     | 1  |
| 126 | Meja Panjang                                   | 2  |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 127 | Meja Rapat                             | 3  |
| 128 | Mesin Absen (Time Recorder)            | 3  |
| 129 | Mesin Absensi                          | 1  |
| 130 | Mesin Jahit                            | 7  |
| 131 | Mesin Ketik Listrik Portable           | 1  |
| 132 | Mesin Ketik Manual Standar (14-16)     | 2  |
| 133 | Mesin Pompa Air                        | 2  |
| 134 | Microphone                             | 11 |
| 135 | Modem                                  | 1  |
| 136 | Monitor                                | 1  |
| 137 | Mouse                                  | 4  |
| 138 | Multi Chancl Analyser                  | 1  |
| 139 | Neraca Dengan Digital Display          | 1  |
| 140 | Note Book                              | 31 |
| 141 | P.C Unit/ Komputer PC                  | 71 |
| 142 | Pakaian Panas/Lengkap                  | 7  |
| 143 | Papan Nama Instansi                    | 17 |
| 144 | Papan Pengumuman                       | 1  |
| 145 | Peralatan Jaringan Lain-lain           | 16 |
| 146 | Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain | 1  |
| 147 | Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain      | 1  |
| 148 | Perkakas Bengkel Kayu Lain-lain        | 8  |
| 149 | Personal Komputer Lain-lain            | 2  |
| 150 | Pesawat Telephone                      | 1  |
| 151 | PH Meter                               | 7  |
| 152 | Pick Up                                | 4  |
| 153 | Plankton Net                           | 2  |
| 154 | Ploter                                 | 2  |
| 155 | Pocket Altimeter                       | 1  |
| 156 | Power Supply                           | 2  |
| 157 | Power Supply Microphone                | 1  |
| 158 | Printer                                | 82 |
| 159 | Proyektor + Attachment                 | 6  |
| 160 | Rak Kayu                               | 4  |
| 161 | Rak-rak Penyimpanan                    | 2  |
| 162 | Refractometer                          | 1  |
| 163 | Remote Control Unit                    | 1  |
| 164 | Rol Meter                              | 2  |
| 165 | Router                                 | 1  |
| 166 | Scanner                                | 2  |
| 167 | Sedan                                  | 3  |
| 168 | Selang Penyemprot Air                  | 13 |
| 169 | Sepatu (International Safety Tester)   | 35 |
| 170 | Sepeda Motor                           | 44 |
| 171 | Sofa                                   | 6  |
| 172 | Sound Level Meter                      | 1  |

|     |                                  |    |
|-----|----------------------------------|----|
| 173 | Speaker Aktive Komputer          | 4  |
| 174 | Spectrophotometer                | 1  |
| 175 | Speed Boat                       | 3  |
| 176 | Staion Wagon                     | 1  |
| 177 | Sumber Radiasi Lain-lain         | 1  |
| 178 | Switch Hub                       | 5  |
| 179 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1  |
| 180 | Tanaman Perkebunan Lain-lain     | 1  |
| 181 | Tandon Air                       | 1  |
| 182 | Telephone Mobile                 | 1  |
| 183 | Televisi                         | 2  |
| 184 | Teralis                          | 1  |
| 185 | Teropong                         | 1  |
| 186 | Thermometer                      | 1  |
| 187 | Timbangan                        | 4  |
| 188 | Turbidi Meter                    | 2  |
| 189 | UPS                              | 23 |
| 190 | UV/VIS Spectrophotometer         | 1  |
| 191 | Water Sampler                    | 2  |
| 192 | Wireless Lan (Internal Card)     | 1  |
| 193 | Wireless Lan (USB)               | 1  |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

## 1.6. Isu Strategis

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran,sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas,mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kepulauan Riau. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 1.4. Permasalahan Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

| No | Masalah Pokok   | Masalah  | Akar Masalah   |
|----|---|--|--|
| 1. | Permasalahan Terkait Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | <p>1. Rendahnya tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>2. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan</p> <p>3. Rendahnya kapasitas SDM di bidang pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>4. Kurangnya tutupan vegetasi dan belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam</p> <p>5. Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional</p> <p>6. Pengembangan pembibitan tanaman kehutanan masih belum optimal</p> | <p>a. Penegakan hukum lingkungan yang belum terpadu antar sektor yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum</p> <p>b. Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup</p> <p>a. Kesadaran masyarakat dan pelaku industri akan penanganan limbah masih rendah sehingga terjadi pencemaran air, udara dan tanah</p> <p>b. Belum terkelolanya sampah dan limbah B3 secara optimal ditingkat masyarakat</p> <p>a. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup karena kurangnya kapasitas masyarakat yang memahami tentang permasalahan lingkungan dan penangannya</p> <p>b. Belum terpenuhinya SDM laboratorium lingkungan sesuai dengan kuantitas dan terbatasnya sarana prasarana laboratorium</p> <p>c. Pelayanan pengujian laboratorium perlu ditingkatkan</p> <p>a. Belum terkelolanya Daerah Aliran Sungai/DAS dengan baik</p> <p>b. Kondisi hutan yang masih rentan terhadap Gangguan</p> <p>c. Tingginya ancaman dan masih rendahnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap keberadaan dan kelestarian sumber alam</p> <p>a. Tidak sebandingnya volume sampah dengan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPA</p> <p>b. Pengelolaan TPA yang belum optimal</p> <p>a. Minimnya ketersediaan bibit tanaman kehutanan yang berkualitas.</p> <p>b. Ketersediaan sumber benih berkualitas yang terbatas</p> <p>a. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya hutan baik potensi HHK (Hasil Hutan Kayu), HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu), potensi wisata dan jasa lingkungan di kawasan hutan sebagai salah satu faktor pengungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>b. Pelaksanaan penatausahaan produksi hasil hutan yang masih belum sesuai dengan kondisi ideal.</p> <p>c. Masih ditemui di beberapa lokasi ketidakjelasan batas kawasan hutan dengan non kawasan hutan yang berpotensi adanya pembibitan lahan dan/atau okupasi lahan</p> <p>a. Rasio pemanfaatan hutan yang masih belum optimal.</p> <p>b. Adanya gangguan terhadap sumberdaya hutan baik gangguan alam maupun manusia.</p> |
| 2. | Rendahnya Nilai Produksi Kehutanan  | <p>1. Belum perencanaan pembinaan kehutanan optimalnya serta usaha</p> <p>2. Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Kepri belum optimal</p>   | <p>a. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya hutan baik potensi HHK (Hasil Hutan Kayu), HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu), potensi wisata dan jasa lingkungan di kawasan hutan sebagai salah satu faktor pengungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>b. Pelaksanaan penatausahaan produksi hasil hutan yang masih belum sesuai dengan kondisi ideal.</p> <p>c. Masih ditemui di beberapa lokasi ketidakjelasan batas kawasan hutan dengan non kawasan hutan yang berpotensi adanya pembibitan lahan dan/atau okupasi lahan</p> <p>a. Rasio pemanfaatan hutan yang masih belum optimal.</p> <p>b. Adanya gangguan terhadap sumberdaya hutan baik gangguan alam maupun manusia.</p>   |

|  |  |                                      |  |
|--|--|--------------------------------------|--|
|  |  |                                      | c. Kondisi tegakan hutan di Yogyakarta sebagian besar didominasi tegakan umur muda dan jumlah batang per hektar di bawah standar normal/optimal  |
|  |  | 3. Rendahnya terkelolanya konservasi | <p>a. Upaya konservasi, rehabilitasi, dan pengkayaan sumberdaya hutan dalam pemenuhan keseimbangan lingkungan masih perlu ditingkatkan.</p> <p>b. Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan oleh pemerintah dan warga masyarakat belum optimal</p> |

## **1.7. Sistematika Penyusunan Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**

Proses pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan yaitu penyiapan data dan informasi, sampai tersusunnya laporan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini disajikan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat strategis, yaitu program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output dan sebagian outcome. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2023. Selanjutnya capaian kinerja (performance results) kegiatan-kegiatan tahun 2023 diperbandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi

Uraian singkat dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut :

### **Bab I – Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II – Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang Bersangkutan

### **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

## B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

## **Bab IV – Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Program, Kegiatan dan Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau**

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Adapun visi dan misi Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

##### **Visi dan Misi**

###### **✓ Visi**

Visi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 : **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**.

###### **✓ Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**, misi yang yang ditempuh sebanyak 5 (lima) misi, yaitu sebagai berikut :

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa.
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Langkah lebih lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut maka perlu penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka

melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) 90 tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, maka program yang dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**
- 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**
- 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).**
- 4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**
- 5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**
- 6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**
- 7. Program Pengelolaan Persampahan**
- 8. Program Pengelolaan Hutan**

## 9. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Adapun indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut (Tabel 2.1) :

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

| No | Indikator Tujuan/ Sasaran   | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020 | Target Capaian Setiap Tahun |       |              |       |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026 |
|----|---|--|-----------------------------|-------|--------------|-------|-------|---|
|    |   |  | 2021                        | 2022  | 2023         | 2024  | 2025  |   |
| 1  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                                       | 67,00  | 69,47                       | 69,73 | <b>69,95</b> | 70,18 | 70,28 | 70,38   |
| 2  | Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah            | N/A  | 20                          | 20    | <b>20</b>    | 100   | 100   | 100   |
| 3  | Indeks Kualitas Air Laut  | N/A  | 76,10                       | 76,75 | <b>77,39</b> | 78,04 | 78,04 | 78,04   |
| 4  | Indeks Kualitas Air   | 54,00  | 56,60                       | 56,70 | <b>56,80</b> | 56,90 | 56,90 | 56,90   |
| 5  | Indeks Kualitas Udara Ambien  | 90,59  | 88,14                       | 88,25 | <b>88,35</b> | 88,46 | 88,46 | 88,46   |
| 6  | Indeks Kualitas Tutupan Lahan   | 59,06  | 59,07                       | 59,08 | <b>59,09</b> | 59,10 | 59,10 | 59,10   |
| 7  | Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau | 0  | 0                           | 14,28 | <b>14,28</b> | -     | -     | -   |
| 8  | Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi                            | 20   | 26,27                       | 33,33 | <b>33,33</b> | 40,00 | 40,00 | 46,67   |
| 9  | Tingkat kepatuhan terhadap regulasi   | 100  | 100                         | 100   | <b>100</b>   | 100   | 100   | 100   |
| 10 | Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan                                   | 0  | 28,57                       | 42,85 | <b>57,14</b> | 71,43 | 71,43 | 71,43   |
| 11 | Persentase Perusahaan yang Taat Aturan  | 100  | 100                         | 100   | <b>100</b>   | 100   | 100   | 100   |
| 12 | Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup                             | 83,33  | 57,14                       | 57,14 | <b>71,43</b> | 100   | 100   | 100   |
| 13 | Persentase  | 22   | 24                          | 26    | <b>27</b>    | 28    | 30    | 30  |

| No | Indikator Tujuan/ Sasaran                                  | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020 | Target Capaian Setiap Tahun |       |              |       |       | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026 |
|----|--|--|-----------------------------|-------|--------------|-------|-------|---|
|    |  |  | 2021                        | 2022  | 2023         | 2024  | 2025  |   |
|    | Pengurangan Sampah   |  |                             |       |              |       |       |   |
| 14 | Persentase Penanganan Sampah                               | 75   | 73                          | 73    | <b>72</b>    | 71    | 70    | 70  |
| 15 | Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku    | 25,31  | 27,00                       | 27,10 | <b>27,20</b> | 27,32 | 27,41 | 27,50   |
| 16 | Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan                         | 25,31  | 27,00                       | 27,10 | <b>27,20</b> | 27,32 | 27,41 | 27,50   |
| 17 | Rehabilitasi Lahan Kritis                                  | 5  | 5                           | 5     | <b>5</b>     | 5     | 5     | 5   |
| 18 | Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat       | 88   | 500                         | 500   | <b>500</b>   | -     | -     | -   |
| 19 | Jumlah akses pengelolaan hutan oleh masyarakat (Kelompok)  |  |                             |       |              | 30    | 30    | 30  |
| 20 | Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau | 2  | 2                           | 2     | <b>2</b>     | -     | -     | -   |
| 21 | Jumlah Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau (DAS) |  |                             |       |              | 2     | 2     | 2   |
| 22 | Nilai SAKIP  | B  | B                           | B     | <b>B</b>     | B     | B     | B   |

Ada beberapa isu strategis di Provinsi Kepulauan Riau yang terkait dengan urusan lingkungan hidup dan kehutanan antara lain :

1. Permasalahan Terkait Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

Adapun masalah yang terkait dengan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ;

- Sebagian waduk di wilayah Kepulauan Riau memiliki status air tercemar sedang
- Menurunnya kualitas udara akibat bencana asap kebakaran hutan
- Meningkatnya pencemaran laut dan pantai di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

2. Permasalahan Terkait Konservasi, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Adapun masalah yang terkait dengan Konservasi, Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah ;

- Meluasnya lahan kritis akibat penambangan dan perluasan kawasan industri
- Masih rendahnya cakupan rehabilitasi dibanding luas areal kerusakan lahan.
- Kerusakan terumbu karang dan lamun di kawasan pesisir
- Terjadinya kerusakan hutan mangrove
- Kerentanan Provinsi Kepulaun Riau wilayahnya terhadap terjadinya perubahan iklim
- Terbatasnya luasan Ruang Terbuka Hijau
- Masih adanya pengaduan masalah lingkungan yang belum terselesaikan

3. Permasalahan Terkait Tata Kelola Kehutanan dan Kajian Dampak Lingkungan;

Adapun masalah yang terkait dengan Tata Kelola Kehutanan dan Kajian Dampak Lingkungan adalah ;

- Tingginya tingkat kerusakan kawasan hutan yang diakibatkan oleh aktivitas ilegal loging, perladangan berpindah, dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah
- Belum adanya Persetujuan DPR RI pada usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dengan cakupan yang luas dan bernilai strategis (DPCLS) seluas ± 23.872 Ha yang telah disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai dasar terbitnya perubahan Keputusan terkait kawasan hutan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau
- Masih adanya usaha industri kayu yang belum memiliki sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
- Belum beroperasinya Kesatuan Pengelolaah (KPH) sebagai pengelola kawasan hutan di tingkat tapak
- Masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan

4. Permasalahan terkait Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Adapun masalah yang terkait dengan Permasalahan terkait Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas adalah ;

- Meningkatnya produksi sampah rumah tangga dan belum optimalnya pengelolaan sampah oleh kabupaten/kota
- Belum tersedianya TPA regional dan sarana prasarana pendukungnya

terutama di Pulau Bintan

Ada beberapa isu strategis di Provinsi Kepulauan Riau yang terkait dengan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain :

1. Meningkatnya pencemaran lingkungan perairan akibat pembuangan limbah sludge oil
2. Menurunnya kualitas udara akibat bencana asap kebakaran hutan.
3. Luasnya lahan kritis akibat penambangan dan perluasan kawasan industri
4. Terjadinya kerusakan pada kawasan hutan

## **2.2. Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023**

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

| No. | Sasaran Strategis                                    | Indikator Strategis   | Target       |
|-----|--|---|--------------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)          |
| 1.  | Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                       | <b>69,95</b> |
| 2.  | Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari               | PDRB Sektor Kehutanan (Milyar/Rp)                             | <b>27,20</b> |
|     |  | Meningkatnya Akses Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat (Hektar) | 500          |

Adapun program yang mendukung dalam rangka mencapai kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Program dan Anggaran Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

| Program  | Anggaran (Rp.)    | Keterangan |
|--|-------------------|------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 29.264.021.450,00 | APBD       |
| 2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup                  | 439.140.835,00    | APBD       |
| 3. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | 250.000.000,00    | APBD       |
| 4. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup         | 55.240.700,00     | APBD       |

| Program   | Anggaran (Rp.) | Keterangan |
|---|----------------|------------|
| 5. Program pengelolaan persampahan  | 246.147.805,00 | APBD       |
| 6. Program Pengelolaan Hutan  | 472.448.079,00 | APBD       |
| 7. Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan | 698.494.000,00 | APBD       |
| 8. Program Pengelolaan DAS  | 35.906.000,00  | APBD       |

Untuk perjanjian kinerja pejabat eselon III Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023, dapat dilihat dari tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja pejabat Eselon III Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

| No   | Sasaran Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Target                             |
|--|--|---|------------------------------------|
| <b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>                          |  |   |                                    |
| 1  | Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)   | 69,95                              |
| 2  | Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari   | PDRB Sektor Kehutanan (Milyaran/Rp)   | 27,20                              |
|  |  | Meningkatnya Akses pengelolaan Hutan oleh Masyarakat (hektar)   | 500                                |
| <b>Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>               |  |   |                                    |
| 1  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li><li>• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li></ul> | Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja OPD <ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedianya Renja dan Lakip OPD dan Tersedianya Renstra OPD</li><li>• Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah</li></ul> | 12 Bulan<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen |
| 2  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan, serta Administrasi Keuangan ASN  | 12 Bulan                           |
| 3.   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur   | 12 Bulan                           |
| 4.   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran   | 1 Tahun                            |
| <b>Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b> |  |   |                                    |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Air Laut   | Indeks Kualitas Air Laut  | 77,39                              |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Air Baku   | Indeks Kualitas Air   | 56,80                              |
| 3  | Meningkatnya Kualitas Udara  | Indeks Kualitas Udara   | 88,35                              |
| 4  | Terlaksananya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko LH  | Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Kepulauan Riau   | 1 Laporan                          |
| 5  | Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD   | Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Kepri   | 1 Dokumen                          |

| No   | Sasaran Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Target        |
|--|--|---|---------------|
| 6  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut      | Terlaksananya pengamatan air bersih, udara ambien, tutupan lahan, dan air laut Tersedianya peralatan AQMS   | 1 Laporan     |
| 7  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                            | Tersedianya Penyusunan Inventarisasi GRK dan Pembinaan Kampung Iklim  | 1 Laporan     |
| 8  | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Perusahaan yang dinilai kinerjanya dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup   | 10 Perusahaan |
| 9  | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi   | Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor  | 12 Bulan      |
| <b>Bidang Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Kajian Dampak Lingkungan</b>                      |  |   |               |
| 1.   | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional   | Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana TPA di Provinsi Kepulauan Riau  | 1 Paket       |
| <b>Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b> |  |   |               |
| 1.   | Meningkatnya Pendampingan dan Pengembangan Perhutanan Sosial pada KPH  | Luas kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial   | 4 Ha          |
| 2.   | Terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi  | Persentase penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup   | 71,43 %       |
| 3  | Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS   | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pengelolaan DAS   | 2 kali        |
| 4  | Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan  | Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan  | 1 Laporan     |
| 5  | Terpenuhinya reabilitasi di luar kawasan Hutan Negara  | Laporan atas hasil pembinaan dan /atau pengawasan rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan  | 1 Laporan     |
| <b>Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan</b>                                      |  |   |               |
| 1.   | Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Isin Usaha Atau Kerjasama Pemanfaatan Di Kawasan Hutan Produksi                                     | 1 Dokumen     |
| 2.   | Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun   | Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan pengendalian dan pengawasan PBPHH (kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi | 3 Dokumen     |

### 2.3. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai penilaian setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan dana/anggaran yang tersedia. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

**Tabel 2.5. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau**

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja  | Keterangan  |
|----|--|--|---|
| 1. | Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)                  | $IKLH = (IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (IKTL \times 40\%)$ |
| 2  | Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari               | PDRB Sektor Kehutanan terhadap PDRB Harga berlaku (Miliar) | 27,20   |

Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra serta pelaksanaan program dan kegiatan merupakan langkah awal dalam proses akutabilitas dimana pelaksanaan program dan kegiatan ini akan dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan pendanaan yang tersedia.

Tabel 2.6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

| Program   | Kegiatan  | Anggaran (Rp.) |
|---|---|----------------|
| Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                | Kegiatan :<br>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi   | 439.140.835,00 |
|   | Sub Kegiatan :<br>Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup   | 439.140.835,00 |
| Program Penanganan pengaduan Lingkungan Hidup                       | Kegiatan :<br>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi   | 55.240.700,00  |
|   | Sub Kegiatan :<br>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi   | 55.240.700,00  |
| Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Kegiatan :<br>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup   | 0              |
|   | Sub Kegiatan :<br>Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut       | 0              |
|   | Sub Kegiatan :<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                             | 0              |
|   | Sub Kegiatan :<br>Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi  | 489.135.412,00 |
| Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat               | Kegiatan :<br>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi  | 250.000.000,00 |
|   | Sub Kegiatan :<br>Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 250.000.000,00 |
| Program   | Kegiatan  | Anggaran (Rp.) |
| Program Pengelolaan Persampahan                                     | Kegiatan :<br>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional  |                |

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
|   | Sub Kegiatan :<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional  | 246.147.805                    |
| Program Pengelolaan Hutan   | Kegiatan :<br>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung   | 109.100.192,00                 |
|   | Sub Kegiatan :<br>• Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi<br>• Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung | 87.393.676,00<br>21.706.516,00 |
|   | Kegiatan :<br>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara   | 297.035.500,00                 |
|   | Sub Kegiatan :<br>Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan  | 297.035.500,00                 |
|   | Kegiatan :<br>Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m <sup>3</sup> /Tahun  | 38.499.787,00                  |
|   | Sub Kegiatan :<br>Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m <sup>3</sup> /Tahun   | 38.499.787,00                  |
|   | Kegiatan :<br>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi  | 27.812.600,00                  |
|   | Sub Kegiatan :<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan  | 27.812.600,00                  |
| Program Pendidikan dan Pelatihan, Pernyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Kegiatan :<br>Pelaksanaan Pernyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan  | 698.494.000,00                 |
|   | Sub Kegiatan :<br>Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan  | 323.577.100,00                 |
|   | Sub Kegiatan :<br>Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial  | 374.916.900,00                 |
| Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)  | Kegiatan :<br>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi   | 698.494.000,00                 |
|   | Sub Kegiatan :<br>Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS   | 323.577.100,00                 |

## **BAB 3**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Riau.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode/ tahun tertentu.

Pengukuran tingkat capaian kinerja adalah proses sistematik dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan strategi OPD. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik, komponen, realisasi dan kondisi :

1. Indikator dengan progress positif adalah indikator dengan realisasi semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik, maka menggunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian kinerja Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Indikator dengan progress negatif adalah indikator dengan semakin tinggi realisasi menunjukkan rendahnya capaian kinerja, maka menggunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian kinerja Indikator} = \frac{\text{Realisasi} (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran

| No | Katagori          | Katagori Capaian   |
|----|-------------------|--------------------|
| 1  | $91\% \leq 100\%$ | Sangat Tinggi (ST) |
| 2  | $76\% \leq 90\%$  | Tinggi (T)         |
| 3  | $66\% \leq 75\%$  | Sedang (S)         |
| 4  | $51\% \leq 75\%$  | Rendah (R)         |
| 5  | $\leq 50\%$       | Sangat Rendah (SR) |

### 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Untuk pencapaian kinerja organisasi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Rencana Strategis (renstra) 2021 – 2026 selama 5 tahun dapat dilihat dari tabel berikut ini :

#### 3.1.1 Membandingkan Capaian kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berikut ini adalah capaian kinerja antara target dan realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.

Tabel 3.2 Evaluasi Pencapaian antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis                                    | Indikator Kinerja   | Tahun 2023   |              | Capaian Tahu 2023 | Keterangan    |
|----|--|---|--------------|--------------|-------------------|---------------|
|    |  |   | Target       | Realisasi    |                   |               |
| 1. | Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi (Indeks)                            | 69,95        | 74,26        | 106,16%           | Sangat Tinggi |
|    |  | Percentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah            | 20%          | 20%          | 100%              | Sangat Tinggi |
|    |  | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)   | 77,39 Indeks | 81,81 Indeks | 105,71%           | Sangat Tinggi |
|    |  | Indeks Kualitas Air (IKA)   | 56,80 Indeks | 54,93 Indeks | 96,71%            | Sangat Tinggi |
|    |  | Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU)  | 88,35 Indeks | 90,13 Indeks | 102,01%           | Sangat Tinggi |
|    |  | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)  | 59,09 Indeks | 66,97 Indeks | 113,33%           | Sangat Tinggi |
|    |  | Percentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau | 28,57%       | 50,00%       | 175,01%           | Sangat Tinggi |

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Tahun 2023 |           | Capaian Tahu 2023 | Keterangan    |
|----|---|---|------------|-----------|-------------------|---------------|
|    |   |   | Target     | Realisasi |                   |               |
|    |   | Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi        | 40%        | 50%       | 125%              | Sangat Tinggi |
|    |   | Tingkat kepatuhan terhadap regulasi                       | 100%       | 100%      | 100%              | Sangat Tinggi |
|    |   | Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan               | 71.43%     | 71,43 %   | 100%              | Sangat Tinggi |
|    |   | Persentase Perusahaan yang Taat Aturan                    | 100%       | 100%      | 100%              | Sangat Tinggi |
|    |   | Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup         | 71,43%     | 100%      | 140%              | Sangat Tinggi |
|    |   | Persentase Pengurangan Sampah                             | 27%        | 18,02%    | 69,28%            | Sedang        |
|    |   | Persentase Penanganan Sampah                              | 72%        | 72,55%    | 100,76%           | Sangat Tinggi |
| 2. | Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari                                  | Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (milyar rupiah)        | 27,20      | 25,99     | 95,55%            | Sangat Tinggi |
|    |   | Rehabilitasi Lahan Kritis                                 | 5 Ha       | 302 Ha    | 6.040 %           | Sangat Baik   |
|    |   | Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat      | 500 Ha     | 1.411 Ha  | 282,2 %           | Sangat Baik   |
|    |   | Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Ria | 2 DAS      | 2 DAS     | 100%              | Sangat Baik   |
| 3  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan | Nilai SAKIP   | B          | BB        | 104,22%           | Sangat Baik   |

Dari tabel 3.2 di atas, dapat dilihat realisasi pencapaian indikator kinerja secara keseluruhan mencapai target bahkan ada yang melebihi dari target dan ada belum tercapai targetnya tetapi capaian kinerjanya sudah baik diantaranya adalah :

- Indeks Kualitas Air
- Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan
- Persentase Pengurangan Sampah

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari indikator sasaran kinerja utama yang telah ditargetkan pada tahun 2023 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terealisasi mencapai 106,16 %. Sedangkan indikator meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam milyar rupiah) terealisasi 99,70 %. dengan penjelasan capaian masing-masing indikator sebagai berikut :

### 1. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran 1 : Mewujudkan Penurunan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

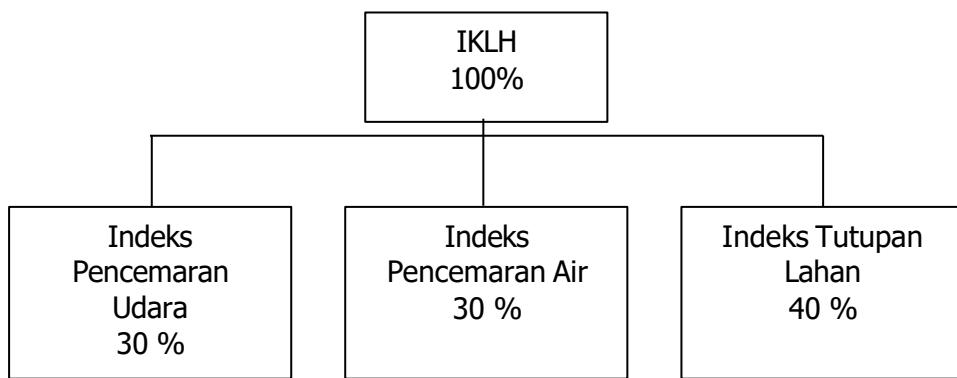
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran, Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023

| Indikator Kinerja Sasaran               | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|--------|--------|-----------|-------------|
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks | 69,95  | 74.26     | 106,16%     |

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Dengan cara mengetahui media lingkungan yang masih kurang baik, sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara lebih tepat sehingga akan lebih efektif dan efisien.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi oleh Kementerian Lingkungan Hidup adalah pengembangan dari konsep yang dikembangkan oleh Virginia Commonwealth University (VCU) dan BPS dengan menggunakan kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan sebagai indikator. Penggabungan parameter ini dimungkinkan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemaran Udara.

Struktur IKLH terdiri dari 4 (empat) indikator, hal ini mengingat perlu adanya keseimbangan antara indikator yang mewakili green issues (isu hijau) dan brown issues (isu coklat).



Tabel 3.4 Indikator dan Parameter IKLH

| No | Indikator      | Parameter       | Bobot | Keterangan                           |
|----|----------------|-----------------|-------|--------------------------------------|
| 1  | Kualitas Udara | SO <sub>2</sub> | 30%   |                                      |
|    |                | NO <sub>2</sub> |       |                                      |
| 2  | Kualitas Air   | TSS             | 30%   | Dihitung Indkes Pencemaran Air (IPA) |
|    |                | BOD             |       |                                      |
|    |                | COD             |       |                                      |
|    |                | DO              |       |                                      |
|    |                | Fosfat          |       |                                      |
|    |                | Total coli      |       |                                      |
|    |                | Fecal coli      |       |                                      |
| 3  | Tutupan Hutan  | Luas Lahan      | 40%   |                                      |

Perhitungan IKLH dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$IKLH = (IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (IKTL \times 40\%)$$

Mulai tahun 2020, indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO<sub>3</sub>, dan Fecal Coli; (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>; (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung; dan (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat.

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

|                            |   |
|----------------------------|---|
| IKLH<br>Kabupaten/<br>Kota | $IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$                       |
| IKLH<br>Provinsi           | $IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$ |
| IKLH<br>Nasional           | $IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$ |

## 2. Capaian Indikator Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan (dalam miliar rupiah)

Sasaran 2 : Meningkatkan Pemanfaatan Hutan Lestari

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran, Target dan Realisasi Kinerja meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan Tahun 2023

| Indikator Kinerja Sasaran                               | Satuan      | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|-------------|--------|-----------|-------------|
| Kontribusi Sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Berlaku | Milyar Rp   | 27,20  | 25,99     | 95,55 %     |
| Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat    | Hektar (Ha) | 500    | 1.411     | 282,2 %     |

Ada 2 (dua) indikator untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan hutan lestari yaitu kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB dan meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat. Pada tahun 2023 target indikator kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 27,20 dengan realisasi 25,99 dengan capaian kinerja 95,55 %. Sedangkan untuk indikator meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat target yang ditetapkan 500 hektar dengan realisasi sebesar 1.411 hektar dan capaian kinerja sebesar 282,2 %.

Program yang mendukung indikator kontribusi kinerja sasaran Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dan indikator meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat adalah program pengelolaan hutan sedangkan kegiatan yang mendukung ada 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

1. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung
2. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
  - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
3. Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m<sup>3</sup>/Tahun
  - Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m<sup>3</sup>/Tahun
4. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Tabel 3.5 Data Jumlah lahan yang dimanfaatkan oleh Kelompok Tani Hutan

| NO | SKEMA | PROVINSI | KAB / KOTA    | KECAMATAN / DESA   | NAMA KELOMPOK                          | LUAS<br>(Ha) | JUMLAH SK | JLH KK | SK                                      |            | JUMLAH LAHAN YANG<br>DIMANFAATKAN (Ha) |
|----|-------|----------|---------------|--|--|--------------|-----------|--------|---|------------|--|
|    |       |          |               |  |  |              |           |        | NO SK                                   | TGL SK     |  |
| 1  | HTR   | KEP RIAU | KARIMUN       | Kec. Buru, Kec. Durai, Kec. karimun, Kec. Kundur dan Kec. Moro | Koperasi Wana Jaya Karimun             | 9,335        | 1         | 934    | 192 Tahun 2010                          | 11/04/2010 | 467                                    |
| 2  | HTR   | KEP RIAU | LINGGA        | Kec. Singkep/Kel. Dabo Lama                                    | Koperasi Mangrove Lestari Indah Lingga | 12,195       | 1         | 122    | SK.145-174/KPTS/2011                    | 29/03/2011 | 61                                     |
| 3  | HKM   | KEP RIAU | NATUNA        | Bunguran Timur / Batu Gajah                                    | KT. Makmur Jaya                        | 2,520        | 1         | 22     | SK.673/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017    | 23/02/2017 | 10                                     |
| 4  | HKM   | KEP RIAU | NATUNA        | Bunguran Timur Laut / Ceruk                                    | Gapoktan Lappan                        | 69           | 1         | 113    | SK.672/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017    | 23/02/2017 | 35                                     |
| 5  | HTR   | KEP RIAU | BINTAN        | Teluk Sebong / Ekang Anculai                                   | KTH Karya Sejahtera Bersama            | 96           | 1         | 22     | SK.5922/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018   | 14/09/2018 | 22                                     |
| 6  | HTR   | KEP RIAU | BINTAN        | Teluk Bintan / Tembeling                                       | KTH Bintan Pesisir Lestari             | 407          | 1         | 37     | SK. 5621/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018  | 9/04/2018  | 37                                     |
| 7  | HTR   | KEP RIAU | BINTAN        | Gunung Kijang / Kel. Kawal                                     | KTH Kawal Buana Lestari                | 470          | 1         | 27     | SK. 5628/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018  | 9/04/2018  | 27                                     |
| 8  | HTR   | KEP RIAU | BINTAN        | Sri Kuala Lobam / Busung                                       | KTH Busung Raya Mandiri                | 286          | 1         | 27     | SK. 5629/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018  | 9/04/2018  | 27                                     |
| 9  | HKM   | KEPRI    | TANJUNGPINANG | Tanjungpinang Timur/Pinang Kencana                             | KTH Sumber Rejeki                      | 342          | 1         | 54     | SK. 5964/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018  | 19/09/2018 | 41                                     |
| 10 | HKM   | KEP RIAU | KOTA BATAM    | Batu Aji / Kel. Kibing   | KTH Purwolestari                       | 199          | 1         | 46     | SK. 7674/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2018 | 23/10/2018 | 92                                     |
| 11 | HKM   | KEP RIAU | KOTA BATAM    | Sekupang / Kel. Tanjung Riau                                   | KTH Harapan Sukses                     | 63           | 1         | 50     | SK. 7664/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2018 | 23/10/2018 | 50                                     |

|    |     |          |                   |   |                               |       |   |     |   |            |    |
|----|-----|----------|-------------------|---|-------------------------------|-------|---|-----|---|------------|----|
| 12 | HKM | KEP RIAU | KOTA BATAM        | Sekupang / Kel. Tanjung Riau              | KTH Mandiri Bersama           | 255   | 1 | 20  | SK. 7673/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2018 | 23/10/2018 | 20 |
| 13 | HKM | KEP RIAU | KARIMUN           | Meral Barat/Darussalam                    | KTH Makmur Sentosa            | 119   | 1 | 26  | SK.8754/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018  | 27/12/2018 | 26 |
| 14 | HKM | KEP RIAU | KARIMUN           | Meral Barat/Pasir Panjang                 | KTH Wanabakti                 | 113   | 1 | 24  | SK.8531/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018  | 12/12/2018 | 24 |
| 15 | HD  | KEP RIAU | KARIMUN           | Tebing/Pongkar                            | PHPD Pongkar                  | 50    | 1 | -   | SK.9207/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018  | 31/12/2018 | 10 |
| 16 | HKM | KEP RIAU | LINGGA            | Lingga Utara / Resun                      | KT Berkah                     | 61    | 1 | 25  | SK. 5419/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018  | 27/08/2018 | 25 |
| 17 | HKM | KEP RIAU | KEPULAUAN ANAMBAS | Siantan / Tarempa Selatan                 | KTH Karya Bersama             | 81    | 1 | 58  | SK. 5473/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018  | 27/08/2018 | 29 |
| 18 | HD  | KEP RIAU | NATUNA            | Bunguran Barat/Mekar jaya                 | LPHD Mekar Jaya               | 1,766 | 1 | -   | SK.6244/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2019   | 7/11/2019  | 45 |
| 19 | HKm | KEP RIAU | NATUNA            | Bunguran Selatan/Cemaga Selatan           | KTH Ingin Maju                | 3,537 | 1 | 173 | SK.6241/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2019   | 7/11/2019  | 87 |
| 20 | HKm | KEP RIAU | KARIMUN           | Kundur Barat/Sawang Selatan               | KTH Sakti Mandiri             | 147   | 1 | 19  | SK.7382/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019   | 9/09/2019  | 29 |
| 21 | HKm | KEP RIAU | KARIMUN           | Kundur Barat/Gemuruh                      | KTH Gemuruh                   | 28    | 1 | 18  | SK. 7588/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019  | 19/09/2019 | 18 |
| 22 | HKm | KEP RIAU | BINTAN            | Bintan Utara / Tanjung Uban Utara         | KTH Maju Bersama              | 77    | 1 | 37  | SK. 7594/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019  | 20/09/2019 | 37 |
| 23 | HKm | KEP RIAU | NATUNA            | Bunguran/ Cemaga Selatan                  | KTH Cinta Damai               | 88    | 1 | 37  | SK. 827/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2020   | 26/02/2020 | 28 |
| 24 | HKm | KEP RIAU | KOTA BATAM        | Kecamatan Sungai Beduk/Kelurahan Mangsang | KTH Gapoktan Mangsang Bersatu | 312   | 1 | 240 | SK. 367/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/1/2021   | 26/01/2021 | 85 |
| 25 | HKm | KEP RIAU | KOTA BATAM        | Nongsa/Batu Besar                         | Kelompok Wisata Mangrove      | 79    | 1 | 15  | SK. 371/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/1/2021   | 26/01/2021 | 15 |

|               |     |          |            |   |   |               |           |              |  |            |              |
|---------------|-----|----------|------------|---|---|---------------|-----------|--------------|--|------------|--------------|
| 26            | HD  | KEP RIAU | BINTAN     | Bintan Utara /<br>Lancang Kuning                            | LPHD Lancang Kuning                               | 66            | 1         | -            | SK. 1526/MENLHK-<br>PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 30/03/2021 | 10           |
| 27            | HKm | KEP RIAU | BATAM      | Sungai Beduk /<br>Tanjung Piayu                             | Kelompok Tani<br>Tambak Hutan<br>Mangrove         | 79            | 1         | 27           | SK. 1267/MENLHK-<br>PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 30/03/2021 | 27           |
| 28            | HKm | KEP RIAU | BINTAN     | Kecamatan Bintan<br>Utara/Kelurahan<br>Tanjung Uban Selatan | KTH Nelayan Tambak<br>Bintan                      | 6             | 1         | 17           | SK. 1470/MENLHK-<br>PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 30/03/2021 | 3            |
| 29            | HKm | KEP RIAU | KOTA BATAM | Batuaji/Buliang   | KTH Bukit Mata Kucing<br>Lestari                  | 159           | 1         | 24           | SK. 1266/MENLHK-<br>PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 | 30/03/2021 | 24           |
| 30            | HKm | KEP RIAU | KOTA BATAM | Bulang/ Kelurahan<br>Setokok                                | Kelompok Masyarakat<br>Kampung Wisata<br>Mangrove | 56            | 1         | 24           | SK.5221/MENLHK-<br>PSKL/PKPS/PSL.0/5/2023  | 15/05/2023 | 0            |
| <b>JUMLAH</b> |     |          |            |   |   | <b>33,061</b> | <b>30</b> | <b>3.336</b> |  |            | <b>1,411</b> |

### 3. Capaian Indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan

Sasaran 3 : Nilai sakip

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran, Target dan Realisasi Kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023

| Indikator Kinerja Sasaran                               | Satuan | Target | Realisasi    | Capaian  |
|---|--------|--------|--------------|----------|
| Kontribusi Sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Berlaku | Nilai  | B      | 71,55 ( BB ) | 104,22 % |

Secara umum indikator kinerja sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sudah tercapai dengan baik. Adapun capaian indikator kinerja sasaran dari tahun 2023 seperti tabel berikut :

Tabel 3.7 Indikator Kinerja Sasaran, Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Tahun 2023   |              | Capaian Tahu 2023 | Keterangan    |
|----|---|--|--------------|--------------|-------------------|---------------|
|    |   |  | Target       | Realisasi    |                   |               |
| 1. | Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup                    | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi                | 69,95 Indeks | 74.26 Indeks | 106,16%           | Sangat Tinggi |
| 2. | Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari                                  | Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam miliar rupiah) | 27,20        | 25,99        | 95,55%            | Sangat Tinggi |
| 3  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan | Nilai SAKIP  | B            | BB           | 104,22%           | Sangat Tinggi |

### 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (2021 dan 2023)

Berikut ini adalah capaian kinerja antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (2021 s/d 2023).

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 s/d 2023

| No | Sasaran Strategis                                    | Indikator Kinerja   | Realisasi Kinerja |              |              |
|----|--|---|-------------------|--------------|--------------|
|    |  |   | 2021              | 2022         | 2023         |
| 1. | Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi                                     | 73,19 Indeks      | 74,13 Indeks | 74.26 Indeks |
|    |  | Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah            | 100 %             | 50 %         | 20 %         |
|    |  | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)   | 75,68 Indeks      | 85,56 Indeks | 81.81 Indeks |
|    |  | Indeks Kualitas Air (IKA)   | 55,15 Indeks      | 56,79 Indeks | 54.93 Indeks |
|    |  | Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU)  | 90,91 Indeks      | 90,27 Indeks | 90.13 Indeks |
|    |  | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)  | 60,39 Indeks      | 58,00 Indeks | 66.97 Indeks |
|    |  | Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau | 0                 | 50%          | 50%          |
|    |  | Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi                            | 26,67 %           | 40 %         | 50 %         |
|    |  | Tingkat kepatuhan terhadap regulasi   | 100 %             | 100 %        | 100 %        |
|    |  | Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan                                   | 28,57 %           | 42,85 %      | 71,43%       |
|    |  | Persentase Perusahaan yang Taat Aturan  | 100 %             | 100 %        | 100 %        |
|    |  | Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup                             | 80 %              | 100 %        | 100 %        |
|    |  | Persentase Pengurangan Sampah   | 24 %              | 12,85 %      | 18,02 %      |
|    |  | Persentase Penanganan Sampah  | 74 %              | 72,32 %      | 72,55 %      |
| 2. | Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari               | Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam miliar rupiah)                      | 28,347            | 27,12        | 25,99        |
|    |  | Rehabilitasi Lahan Kritis   | 5                 | 330          | 302 Ha       |
|    |  | Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat                          | 500               | 500          | 1.411        |
|    |  | Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Ria                     | 2 DAS             | 2 DAS        | 2 DAS        |

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja |      |      |
|----|---|-------------------|-------------------|------|------|
|    |   |                   | 2021              | 2022 | 2023 |
| 3  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan | Nilai SAKIP       | BB                | BB   | BB   |

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja sasaran pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 secara umum sangat baik untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Hal ini manunjukkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau juga sangat baik. Indikator ke-1 dan ke-2 yaitu Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan sebesar 25,99 Milyar Rupiah. Persentase Pengurangan Sampah sebesar 18,02%

### 3.1.3 Tabel 3.8 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 tahun Berjalan dengan tahun Sebelumnya

| No. | Indikator Kinerja   | Tahun 2019 |           |         | Tahun 2020 |           |         | Tahun 2021 |           |         | Tahun 2022 |           |          | Tahun 2023 |           |         |
|-----|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|----------|------------|-----------|---------|
|     |   | Target     | Realisasi | Capaian  | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi                                     | 68,90      | 66,50     | 96,52   | 69,20      | 67,00     | 96,82   | 69,80      | 73,19     | 104,86  | 69,73      | 74,13     | 106,31   | 69,73      | 74,26     | 106,16% |
| 2   | Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah            | -          |           | -       | -          | -         | -       | -          | -         | -       | 20         | 50        | 250      | 20 %       | 20%       | 100%    |
| 3   | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)   | N/A        | N/A       | N/A     | N/A        | N/A       | N/A     | -          | 76,10     | -       | 76,75      | 85,56     | 111,48   | 76,75      | 81,81     | 105,71% |
| 4   | Indeks Kualitas Air (IKA)   | N/A        | 57,85     | -       | N/A        | 54,00     | -       | -          | 56,60     | -       | 56,70      | 56,79     | 100,16   | 56,70      | 54,93     | 96,71%  |
| 5   | Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU)  | N/A        | 90,83     | -       | N/A        | 90,59     | -       | -          | 88,14     | -       | 88,25      | 90,27     | 102,29   | 88,25      | 90,13     | 102,01% |
| 6   | Indeks Kualitas Lahan (IKTL)  | -          | 54,75     | -       | -          | 59,06     | -       | -          | 59,07     | -       | 59,08      | 58,00     | 98,17    | 59,08      | 66,97     | 113,33% |
| 7   | Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau | N/A        | N/A       | N/A     | N/A        | N/A       | N/A     | N/A        | N/A       | N/A     | 14,28      | 25,00     | 175,01%  | 28,57%     | 50        | 175,01% |
| 8   | Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi                            | N/A        | N/A       | N/A     | N/A        | 20        | N/A     | N/A        | 26,67     | N/A     | 33,33      | 40        | 120,01   | 40%        | 50%       | 125%    |
| 9   | Tingkat kepatuhan terhadap regulasi   | N/A        | N/A       | N/A     | N/A        | 100       | -       | 100        | 100       | 100     | 100 %      | 100 %     | 100 %    | 100%       | 100%      | 100%    |
| 10  | Persentase Kab/ Kota yang meraih Penghargaan                                  | N/A        | 85,71     | N/A     | N/A        | 100       | N/A     | N/A        | 26,57     | -       | 42,85 %    | 42,85 %   | 100 %    | 71,43%     | 71,43     | 100%    |
| 11  | Persentase Perusahaan yang Taat Aturan  | N/A        | N/A       | N/A     | N/A        | 100       | N/A     | 100        | 100       | 100     | 100 %      | 100 %     | 100 %    | 100%       | 100%      | 100%    |
| 12  | Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup                             | N/A        | N/A       | N/A     | N/A        | 83,33     | N/A     | N/A        | 57,14     | N/A     | 57,14 %    | 100 %     | 175,01 % | 71,43%     | 100%      | 140%    |
| 13  | Persentase Pengurangan Sampah   | N/A        | N/A       | N/A     | N/A        | 20        | N/A     | N/A        | 24        | N/A     | 26 %       | 14,82     | 57,00 %  | 27 %       | 18,02%    | 69,28%  |
| 14  | Persentase Penanganan Sampah  | N/A        | N/A       | N/A     | N/A        | 75        | N/A     | N/A        | 74        | N/A     | 73 %       | 74,42 %   | 99,21 %  | 72 %       | 72,55%    | 100,76% |
| 15  | Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam miliar rupiah)                      | -          | 25,27     | -       | -          | 26,90     | -       | -          | 28,34     | -       | 27,10      | 27,12     | 100,07 % | 27,20      | 25,99     | 95,55%  |
| 16  | Rehabilitasi Lahan Kritis   | 225        | 400       | 177,7   | 230        | 300       | 130,4   | 230        | 300       | 130,4   | 5          | 330       | 6,600 %  | 5 Ha       | 302 Ha    | 6040%   |
| 17  | Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh Masyarakat                          | N/A        | N/A       | N/A     | N/A        | 88,00     | N/A     | N/A        | 500       | N/A     | 500        | 500       | 100 %    | 500 Ha     | 1.411     | 282,2 % |

| No. | Indikator Kinerja   | Tahun 2019 |           |         | Tahun 2020 |           |         | Tahun 2021 |           |         | Tahun 2022 |           |         | Tahun 2023 |           |         |
|-----|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
|     |   | Target     | Realisasi | Capaian |
| 18  | Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Ria | N/A        | N/A       | N/A     | N/A        | 2 DAS     | N/A     | N/A        | 2 DAS     | N/A     | 2 DAS      | 2 DAS     | 100 %   | 2 DAS      | 2 DAS     | 100%    |
| 19  | Nilai SAKIP   | N/A        | B         | N/A     | N/A        | B         | N/A     | B          | BB        | B       | B          | B         | B       | BB         | BB        | 104,22% |

Dari tabel 3.8 di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja tahun 2023 rata-rata tercapai melebihi target, namun ada juga indikator kinerja dibawah target diantaranya ;

- Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan sebesar 25,99
- Persentase Pengurangan Sampah sebesar 18,02%

Untuk persentase pengurangan sampah dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya :

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari sumber/ rumah tangga (memilah sampah dari rumah)
- Minimnya fasilitas serta anggaran penanganan sampah di Kabupaten/Kota
- Belum ada teknologi pengolahan sampah di Kabupaten/Kota
- Belum adanya tenaga penyuluh lingkungan
- Kab/Kota ada yang belum menginputkan di dalam aplikasi.

### 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut ini capaian kinerja tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah sesuai dengan dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra)

Tabel 3.9 Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

| No | Sasaran Strategis                                    | Indikator Kinerja   | Tahun 2023   |           | Capaian Tahun 2023 | Keterangan    |
|----|--|---|--------------|-----------|--------------------|---------------|
|    |  |   | Target RPJMD | Realisasi |                    |               |
| 1. | Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi                                     | 69.73        | 74.26     | 106,16%            | Sangat Tinggi |
|    |  | Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah            | 20 %         | 20%       | 100%               | Sangat Tinggi |
|    |  | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)   | 76,75        | 81.81     | 105,71%            | Sangat Tinggi |
|    |  | Indeks Kualitas Air (IKA)   | 56,70        | 54.93     | 96,71%             | Sangat Tinggi |
|    |  | Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU)  | 88,25        | 90.13     | 102,01%            | Sangat Tinggi |
|    |  | Indeks Kualitas Lahan (IKTL)  | 59,08        | 66.97     | 113,33%            | Sangat Tinggi |
|    |  | Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau | 28.57%       | 50,00%    | 175,01%            | Sangat Tinggi |
|    |  | Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi                            | 40%          | 50%       | 125%               | Sangat Tinggi |
|    |  | Tingkat kepatuhan terhadap regulasi   | 100%         | 100%      | 100%               | Sangat Tinggi |
|    |  | Persentase Kab/ Kota yang meraih Penghargaan                                  | 71.43 %      | 71,43 %   | 100 %              | Sangat Tinggi |
|    |  | Persentase Perusahaan yang Taat Aturan  | 100 %        | 100 %     | 100 %              | Sangat Tinggi |
|    |  | Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup                             | 71,43 %      | 100 %     | 140 %              | Sangat Tinggi |
|    |  | Persentase Pengurangan Sampah   | 27 %         | 18,02 %   | 69,28 %            | Sedaang       |
|    |  | Persentase Penanganan Sampah  | 72 %         | 72,55%    | 100,76 %           | Sangat Tinggi |
| 2. | Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari               | Kontribusi Sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Berlaku                       | 27,20        | 25,99     | 95,55%             | Sangat Tinggi |
|    |  | Rehabilitasi Lahan Kritis   | 5 Ha         | 302 Ha    | 6.040 %            | Sangat Tinggi |
|    |  | Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat                          | 500 Ha       | 1.411     | 282,2 %            | Sangat Tinggi |
|    |  | Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Ria                     | 2 DAS        | 2 DAS     | 100%               | Sangat Tinggi |

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja | Tahun 2023   |           | Capaian Tahun 2023 | Keterangan    |
|----|---|-------------------|--------------|-----------|--------------------|---------------|
|    |   |                   | Target RPJMD | Realisasi |                    |               |
| 3  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan | Nilai SAKIP       | B            | BB        | 104,22             | Sangat Tinggi |

Dari tabel 3.5 di atas, pada tahun 2023 dapat dilihat realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Pada Tahun 2023 adalah 74,26 dan realisasi ini melebihi target RPJMD yang sudah ditetapkan yaitu 69,95. Sedangkan meningkatnya PDRB sektor kehutanan yang diperoleh dengan hasil capaian kinerja yaitu 25,99.

### **3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada)**

Berikut ini capaian kinerja tahun 2023 dengan Target Nasional sesuai dengan dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra)

Tabel 3.10 Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional

| Indikator Kinerja                         | Target | Realisasi Kinerja |       |       | Target RPJMD | Standar Nasional |
|---|--------|-------------------|-------|-------|--------------|------------------|
|   |        | 2021              | 2022  | 2023  |              |                  |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi | 69.95  | 73.19             | 74.13 | 74.26 | 69.95        | 73,08            |
| Meningkatnya PDRB sektor kehutanan        | 27,20  | 28,347            | 27,12 | 25,99 | 27,20        |                  |

Dari tabel di atas, pada tahun 2023 dapat dilihat realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Pada Tahun 2023 adalah 74,26 dan realisasi ini melebihi realisasi nasional yang yaitu 73,08. Sedangkan meningkatnya PDRB sektor kehutanan yang diperoleh dengan hasil capaian kinerja yaitu 27,13

### **3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada Tahun 2023 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau sebesar 74,26 dari target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 69,95 dengan Rating Baik dengan Indeks Respon sebesar 8,32. Sehingga IKLH Provinsi Kepulauan Riau masuk peringkat ke 19 dari 38 Provinsi di Indonesia. Hasil capaian kinerja IKLH dari perhitungan 4 indikator yaitu :

- Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 54,93 dengan rating Sedang;

Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan yang terjadi pada musim kemarau yang membuat volume air sungai berkurang di Kab/Kota, terjadi pencemaran air akibat penggerukan atau pemotongan tebing tanah untuk pelebaran jalan dan influent lain melalui selokan-selokan air yang ada di sekitar waduk di Batam, terbatasnya ketersediaan anggaran untuk melakukan pemantauan kualitas air.

- Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 90,13 dengan rating Sangat Baik;

Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan, hasil evaluasi dari 7 kab/kota dimana berdasarkan evaluasi tersebut indeks respon daerah pada Program Langit Biru pada umumnya kab/kota tersebut memiliki kebijakan dan peraturan, SDM, serta implementasi berupa menyiapkan sarana prasarana seperti pedestrian, jalur sepeda, Ruang Terbuka Hijau (RTH), penerapan area rendah emisi (LEZ); melaksanakan program seperti Car Free Day (CFD) dan gerakan masyarakat (germas) bersepeda. Sementara itu, target dan capaian pada IKU

| No | Kab/Kota           | Target IKU | Capaian IKU | Kriteria |
|----|--------------------|------------|-------------|----------|
| 1  | Kab. Bintan        | 88,76      | 93,62       | Baik     |
| 2  | Kab. Karimun       | 90,41      | 93,05       | Baik     |
| 3  | Kab. Kep. Anambas  | 85,55      | 89,37       | Baik     |
| 4  | Kab. Lingga        | 93,57      | 95,04       | Baik     |
| 5  | Kab. Natuna        | 86,06      | 89,37       | Baik     |
| 6  | Kota Tanjungpinang | 87,84      | 86,37       | Baik     |
| 7  | Kota Batam         | 86,30      | 84,12       | Baik     |

Data kualitas udara merupakan data hasil pengukuran langsung yang mewakili (1) area padat kendaraan (transportasi), (2) area pemukiman, (3) area perkantoran dan (4) area industri pada 7 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Pemilihan 4 lokasi yang mewakili 4 jenis aktivitas pada setiap kabupaten/kota tidak boleh berada dalam 1 lokasi yang sama, namun minimal berjarak 1 kilometer dari titik satu ke titik lainnya. Pemilihan 4 lokasi tersebut adalah:

1. Transportasi Lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor terhadap kualitas udara disekitar jalan raya yang dilakukan pemantauan kualitas udaranya. Jarak titik pengambilan sampel kurang lebih 5 - 10 meter dari bahu jalan. Metodologi LAPORAN IKLH 2021 13.
2. Pemukiman Lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan di sekitar pemukiman padat.
3. Perkantoran/pasar/komersial Lokasi di daerah perkantoran/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/ komersil.
4. Perkantoran/pasar/komersial Lokasi di daerah perkantoran/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/ komersil. Pengukuran dilakukan secara otomatis dan atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata rata tahunan. Parameter yang dipantau adalah NO2 dan SO2 dengan durasi pemantauan dalam setahun adalah sebagai berikut: • Passive sampler: minimal 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali) • Manual aktif: minimal 24 hari per tahun (2 kali per bulan @24 jam) • AQMS fixed station: minimal 65% data (238 data harian per tahun) • AQMS mobile station: minimal 20 data harian per bulan (240 data harian per tahun) Jumlah titik sampling menurut provinsi dapat dilihat pada Tabel 6. Jumlah titik sampling ini merupakan gabungan antara titik samping menggunakan

metode passive sampler baik yang dilakukan dengan dana APBN maupun APBD ditambah dengan titik sampling pemantauan udara ambien otomatis kontinu (AQMS).

Tidak tercapainya Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kota Batam karena adanya pembukaan Kawasan industri, penambahan ruas jalur jalan dan bertambahnya jumlah transportasi di Kota Batam sehingga menyebabkan target indeks kualitas udara di Kota Batam belum tercapai. Namun jika dilihat dari skor dan kriteria yang di tetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Batam masih masuk katagori Baik. Target Indeks Kualitas Udara (IKU) yang di tetapkan oleh Pemerintah Kota Batam pada tahun 2022 sebesar 86,20 dengan capaian 87,71, sehingga di tahun 2023 Pemerintah Kota Batam meningkatkan target IKU sebesar 86,30 yaitu naik 0,1 dari tahun sebelumnya dengan harapan dapat tercapai seperti pada tahun sebelumnya. Keberhasilan pemantauan udara di provinsi Kepulauan Riau tidak lepas dari adanya instrumen AQMS yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di letakkan di 2 (dua) lokasi yaitu Kota batam dan Kota Tanjungpinang. Air Quality Monitoring System (AQMS) adalah Alat Pemantau Kualitas Udara Otomatis untuk mengetahui tingkat pencemaran udara.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 66,97 dengan rating Sedang;

Pada data Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), terdapat 7 kab/kota yang meningkat nilai IKTL. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan luas ruang terbuka hijau di Provinsi Kepulauan Riau. Seperti di Pemukiman dan Taman Kota, baik dalam bentuk taman lingkungan maupun penghijauan pekarangan. Ruang terbuka hijau permukiman yang dikelola dengan baik akan memberikan sumbangsih yang berarti pada luasan ruang terbuka hijau kota seluruhnya.

d. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 81,81 dengan rating Baik.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) mengalami kenaikan karena dari 7 Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi, yang meningkat mutunya. Peningkatan kualitas air laut tentu tak terlepas dari adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir seperti penanaman mangrove, partisipasi masyarakat dalam pengolahan pesisir dan laut dan tentu perbaikan di hulu, hal ini terlihat naiknya IKA

dan IKTL. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaraan dan kerusakan di darat (LANDBASE POLLUTION).

Adapun realisasi IKLH 2023 sebesar 74,26 indeks sedangkan tahun 2022 sebesar 74,13 sehingga ada kenaikan 0,13 indeks dibanding tahun 2022. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.11 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

| No | Sasaran Strategis                                    | Indikator Kinerja  | Tahun 2022   |                |                      | Tahun 2023   |                |                      |
|----|--|--|--------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|----------------------|
|    |  |  | Target 2022  | Realisasi 2022 | Capaian Kinerja 2022 | Target 2023  | Realisasi 2023 | Capaian Kinerja 2023 |
| 1. | Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi                          | 69.73 Indeks | 74,13 Indeks   | 106,31 %             | 69,95 Indeks | 74.26 Indeks   | 106,16%              |
|    |  | Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah | 20 %         | 50 %           | 250 %                | 20 %         | 20 %           | 100%                 |
|    |  | Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)                                    | 76,75 Indeks | 85,56 Indeks   | 111,48 %             | 77.39 Indeks | 81.81 Indeks   | 105,71%              |
|    |  | Indeks Kualitas Air (IKA)  | 56,70 Indeks | 56,79 Indeks   | 100,16 %             | 56,80 Indeks | 54.93 Indeks   | 96,71%               |
|    |  | Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU)                                 | 88,25 Indeks | 90,27 Indeks   | 102,29 %             | 88,35 Indeks | 90.13 Indeks   | 102,01%              |
|    |  | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)                               | 59,08 Indeks | 58,00 Indeks   | 98,17 %              | 59,09 Indeks | 66.97 Indeks   | 113,33%              |

✓ **Alternative solusi yang dilakukan**

a. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Peningkatan kualitas air laut tentu tak terlepas dari adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir seperti penanaman mangrove, partisipasi masyarakat dalam pengolahan pesisir dan laut dan tentu perbaikan di hulu, hal ini terlihat naiknya IKA dan IKTL. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaraan dan kerusakan di darat diantaranya

disebabkan oleh :

- Pembuangan sampah di laut
- Pembuangan Limbah oleh sektor industri
- Reklamasi pantai
- Rusaknya ekosistem laut dan terumbu karang

Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi aturan dan tidak melakukan pencemaran terhadap air laut dengan cara membuang sampah dilaut. Selain itu pemerintah juga harus tegas kepada oknum atau pihak perusahaan yang melakukan pembuangan limbah yang tidak diolah atau tidak aman bagi lingkungan, serta kepada perusahaan yang melakukan kegiatan reklamasi pantai agar patuh pada peraturan yang berlaku. Pemerintah Daerah dalam hal ini baik Kabupaten/Kota juga Provinsi harus melakukan pemantauan air laut secara periodik yaitu 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 22 tahun 2021.

b. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan yang terjadi pada musim kemarau yang membuat volume air sungai berkurang di Kabupaten/Kota, terjadi pencemaran air akibat pengeringan atau pemotongan tebing tanah untuk pelebaran jalan dan influent lain melalui selokan-selokan air yang ada di sekitar waduk di Batam.

Alternatif solusi yang dilakukan agar Indeks Kualitas Air (IKA) dapat di tingkatkan yaitu dengan cara :

- Ketersediaan anggaran untuk melakukan pemantauan
- Melakukan pemantauan kualitas air sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebanyak 4 kali pemantauan dalam setahun (PP 22 Tahun 2021)
- Pemberdayaan Instrumen Pemantauan secara online kualitas air yang ada di Sei Jago di Tanjung Uban Kabupaten Bintan dan sekaligus penyediaan petugas beserta honorarium petugas jaga.

c. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan indeks kualitas udara (IKU)

adalah dengan cara :

- Pemerintah Daerah dalam hal ini baik Kabupaten/Kota juga Provinsi harus melakukan pemantauan udara secara periodik yaitu 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 22 tahun 2021.
- Melaksanakan kembali kegiatan uji emisi, karena sejak tahun 2014 uji emisi sudah tidak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengurangi Kendaraan Pribadi.
- Membatasi Penggunaan Pendingin Udara.
- Efisiensi Penggunaan Listrik sebagai Solusi Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca.
- Kurangi Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

d. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Penyediaan ruang terbuka hijau di suatu kota tidak hanya selalu dari pemerintah, seperti penyediaan taman kota, jalur hijau, dan lainnya. Namun, penyediaan ruang terbuka hijau juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran penghuni kota akan pentingnya ruang terbuka hijau. Berbagai jenis ruang terbuka hijau dapat dilakukan di lahan privat milik masyarakat atau swasta. Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyediaan ruang. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan anggaran untuk melakukan program dan kegiatan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

### **3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Pencapaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana pada tabel di bawah ini :

| <b>Indikator Kinerja</b>                         | <b>Target</b> | <b>Realisasi Kinerja</b> |              |              | <b>Target RPJMD</b> | <b>Standar Nasional</b> |
|--|---------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------------|
|  |               | <b>2021</b>              | <b>2022</b>  | <b>2023</b>  |                     |                         |
| <b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi</b> | <b>69.95</b>  | <b>73.19</b>             | <b>74.13</b> | <b>74.26</b> | <b>69.95</b>        | <b>73,08</b>            |

Pencapaian kinerja IKLH sebesar 74,26 dari target 69,95 merupakan hasil dari kegiatan dari berbagai lintas sektor.

Analisa efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian

kinerja DLHK tahun 2023 adalah :

- Sumber Daya Manusia (SDM) ;

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang menangani Lingkungan Hidup ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sehingga perlu adanya penambahan sumber daya manusia yang sesuai dengan keahlian. Adapun jumlah sumber daya manusia yang ada saat ini sebanyak 11 (sebelas) orang yang tersebar di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebanyak 6 (enam) orang, UPTD. Laboratorium Lingkungan sebanyak 2 (dua) orang dan di Bidang persampahan, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan 3 (tiga) orang, seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.12 Jumlah sumber daya manusia yang menangani Lingkungan Hidup ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

| NO  | NAMA                        | NIP                   | PANGKAT/ GOL RUANG       | JABATAN   |
|-----|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| 1.  | Roki, S.H                   | 19840712 201001 1 021 | Penata Tk.I / III.d      | Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup |
| 2.  | Erlangga Wisnu Wardana, S.E | 19760627 200604 1 023 | Penata Tk.I / III.d      | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda                           |
| 3   | Vera Herlina, S.Sos         | 19881007 201101 2 008 | Penata Tk.I / III.d      | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda                           |
| 4   | Axsal, SKM., M.Kes          | 19800524 200604 1 012 | Penata Muda Tk.I / III.b | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda                        |
| 5   | Iran Andrianto, S.E         | 19790615 201101 1 004 | Penata Tk.I / III.d      | Penelaah Dampak Lingkungan                                    |
| 6.  | Cici Septiarini, S.Si.      | 19851117 201101 2 009 | Penata Tk.I / III.d      | Analis Lingkungan Hidup                                       |
| 7.  | Mardinayanti, S.Si.         | 19840331 201101 2 011 | Penata Muda Tk.I / III.b | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama                     |
| 8   | Milya Hariza, S.T.P.        | 19761223 201101 2 002 | Penata Muda / III.a      | Pengendali Dampak Lingkungan Mahir                            |
| 9.  | Rupi'ah, S.P.               | 19730315 200502 2 006 | Penata Tk.I / III.d      | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda                        |
| 10. | Raden Mariadi N, S.P.       | 19841105 200904 1 002 | Penata Tk.I / III.d      | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda                        |
| 11. | Said Syahro Marfandy, S.E.  | 19751019 201001 1 007 | Penata Tk.I / III.d      | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda                           |

- Sarana

Saat ini sarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau diantaranya adalah :

1. AQMS mobile station

AQMS mobile station yang ada saat ini ada 2 (dua) lokasi yaitu 1 (satu) di Kota

batam tepatnya di batua Aji dan 2 (dua) di Kota Tanjungpinang yang terletak di Pamedan.

## 2. UPTD. Laboratorium Lingkungan

Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau di Jalan Pramuka No.7B Sekupang – Batam. UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah di dukung dengan instrumen atau peralatan untuk pengujian kualitas air, baik air bersih maupun air laut.

### **3.1.8 Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pelaksanaan program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan pagu anggaran Rp. 250.000.000,- yang dialokasikan untuk penganugrahan dan penyerahan sertifikat Penghargaan Perusahaan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup pada periode penilaian tahun 2021 - 2022 serta dilakukan inspeksi ke lapangan kepada perusahaan peserta program penilaian peringkat kinerja perusahaan periode tahun 2022 – 2023, Program Pengelolaan persampahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 246.147.805,- dialokasikan untuk pengelolaan sampah berupa pemberian bantuan kepada 8 (delapan) kelompok bank sampah yaitu 6 (enam) kelompok bank sampah di Kab. Lingga, 1 (satu) kelompok di Kab. Bintan dan 1 (satu) di Kota Tanjung Pinang.

Program pengelolaan hutan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 297.035.500,- dialokasikan untuk pengawasan supaya hutan tersebut tetap lestari dan tidak dirusak oleh masyarakat dan penanaman mangrove seluas 2 (dua) Hektar di Batam. Maka capaian kinerja IKLH Tahun 2023 sebesar 74,26 dari target 69,95 dari program yang langsung mengampu indikator tersebut belum ada tetapi program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai pendukung atas keberhasilan seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.13 Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian Kinerja Tahun 2023

| No            | Program/Sub Kegiatan   | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi          |              |
|---------------|--|---------------------|--------------------|--------------|
|               |  |                     | (Rp.)              | (%)          |
| 1             | <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>   | <b>250.000.000</b>  | <b>228.935.899</b> | <b>91,57</b> |
| 1.1           | Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 250.000.000         | 228.935.899        | 91,57        |
| 2             | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>   | <b>246.147.805</b>  | <b>227.572.050</b> | <b>92,45</b> |
| 2.1           | Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional  | 246.147.805         | 227.572.050        | 92,45        |
| 3             | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>   | <b>297.035.500</b>  | <b>287.461.100</b> | <b>96,78</b> |
| 3.1           | Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan  | 297.035.500         | 287.461.100        | 96,78        |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>793.183.305</b>  | <b>743.969.049</b> | <b>93,80</b> |

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau melalui APBD tahun anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar **32.531.280.156,-** yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 32.043.184.950,- (meliputi Belanja Pegawai Sebesar Rp. 25.746.615.927,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.766.569.023,- serta Belanja Hibah Rp. 530.000.000,-) dan belanja modal sebesar Rp. 488.095.206,- yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar **Rp. 31.487.472.944,-** atau sebesar 96,79%, dan dapat dirinci pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.1 Realisasi Anggaran

| No            | Jenis Belanja           | Anggaran                 | Realisasi                | %            | Sisa Anggaran  |
|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| 1             | 2                       | 3                        | 4                        | 5            | 6              |
| 1             | Belanja Pegawai         | 25.746.615.927,00        | 25.105.914.691,00        | 97,51        | 639.366.836,00 |
| 2             | Belanja Barang dan Jasa | 5.766.569.023,00         | 5.394.280.253,00         | 93,54        | 372.288.770,00 |
| 3             | Belanja Hibah           | 530.000.000,00           | 530.000.000,00           | 100,00       | 530.000.000,00 |
| 4             | Belanja Modal           | 488.095.206              | 457.278.000,00           | 93,69        | 30.817.206,00  |
| <b>JUMLAH</b> |                         | <b>32.531.280.156,00</b> | <b>31.487.472.944,00</b> | <b>96,79</b> | 30.817.206,00  |

Dengan capaian realisasi Belanja Pegawai sebesar 25.105.914.691,- (97,51%), Belanja Barang dan Jasa sebesar 5.394.280.253,- (93,54%), Belanja Hibah sebesar Rp. 530.000.000,- (100,00%) serta Belanja Modal sebesar 457.278.000,- (93,69%), maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau telah mampu mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dengan capaian realisasi anggaran di atas 90%.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat pencapaian kinerja dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 ini, berikut disajikan tabel Ikhtisar Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan persentase tingkat capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.2.2: Ikhtisar Realisasi Belanja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau**

| Uraian                        | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)           | %Tk Capaian   |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| Belanja Pegawai               | 25.746.615.927,00        | 25.107.249.091,00        | 97.51%        |
| <b>Jumlah Belanja Pegawai</b> | <b>25.746.615.927,00</b> | <b>25.107.249.091,00</b> | <b>97.51%</b> |

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari Gaji Pokok PNS dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, dan Honorarium Non PNS. Dengan rincian sebagai berikut:

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi  
Dengan total anggaran sebesar **6.443.898.000,00** dan realisasi sebesar **6.325.287.500,00** atau setara dengan **98.16 %** dan terdapat sisa pagu anggaran **118.610.500,00**.
- Tunjangan Keluarga  
Dengan total anggaran sebesar **647.017.978,00** dan realisasi sebesar **634.100.332,00** atau setara dengan **98.00%** dan terdapat sisa pagu anggaran **12.917.646,00**.
- Tunjangan Jabatan 353.374.000,00 dan realisasi sebesar 350.000.000,00 atau setara dengan 99.05% dan terdapat sisa pagu anggaran 3.374.000,00.  
Tunjangan Fungsional  
Dengan total anggaran sebesar **361.492.200,00** dan realisasi sebesar **354.298.000,00** atau setara dengan **98.01%** dan terdapat sisa pagu anggaran **7.194.200,00**.
- Tunjangan Umum

Dengan total anggaran sebesar **132.114.000,00** dan realisasi sebesar **129.310.000,00** atau setara dengan **97,88%**. dan terdapat sisa pagu anggaran **2.804.000,00**.

- Tunjangan Beras

Dengan total anggaran sebesar **417.240.588,00** dan realisasi sebesar **409.535.100,00** atau setara dengan **98.15%** dan terdapat sisa pagu anggaran **7.705.488,00**.

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Dengan total anggaran sebesar **4.235.331,00** dan realisasi sebesar **4.192.490,00** atau setara dengan **98.99%** dan terdapat sisa pagu **42.841,00**.

- Pembulatan Gaji

Dengan total anggaran sebesar **104.941,00** dan realisasi sebesar **102.934,00** atau setara dengan **98,09%**.

- Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Dengan total anggaran sebesar **703.279.055,00** dan realisasi sebesar **684.043.612,00** atau setara dengan **97.26%** dan terdapat sisa pagu anggaran **19.235.443,00**.

- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

Dengan total anggaran sebesar **13.284.475,00** dan realisasi sebesar **12.999.813,00** atau setara dengan **97.86%** dan terdapat sisa pagu anggaran **284.662,00**.

- Iuran Jaminan Kematian ASN

Dengan total anggaran sebesar **39.853.944,00** dan realisasi sebesar **38.999.951,00** atau setara dengan **97,86%**.

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS

Dengan total anggaran sebesar **7.431.385,00** dan realisasi sebesar **7.219.228.625,00** atau setara dengan **97,15%** dan terdapat sisa pagu anggaran **212.157.213,00**.

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS

Dengan total anggaran sebesar **735.155.155,00** dan realisasi sebesar **718.451.453,00** atau setara dengan **97,73%** dan terdapat sisa pagu anggaran **16.703.702,00**.

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS

Dengan total anggaran sebesar **1.223.647.805,00** dan realisasi sebesar **1.189.918.828,00** atau setara dengan **97,24%** dan terdapat sisa pagu anggaran **33.728.977,00**.

- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

Dengan total anggaran sebesar **6.701.890.617,00** dan realisasi sebesar **6.499.834.053,00** atau setara dengan **96,99%** dan terdapat sisa pagu anggaran **202.056.564,00**.

- Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaa Keuangan

Dengan total anggaran sebesar **538.642.000,00** dan realisasi sebesar **535.612.000,00** atau setara dengan **99,44%** dan terdapat sisa pagu anggaran **3.030.000,00**.

**Tabel 3.2.3 : Ikhtisar Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau**

| Uraian                             | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)           | %Tk Capaian  |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Belanja Operasi<br>Belanja Pegawai | 25.746.615.927,00        | 25.107.249.091,00        | 97,51        |
| Belanja Barang dan Jasa            | 5.766.569.023            | 5.394.280.253,00         | 93,54        |
| Belanja Hibah                      | 530.000.000,00           | 530.000.000,00           | 100,00       |
| Belanja Modal                      | 488.095.206              | 457.278.000,00           | 93,69        |
| <b>Jumlah Belanja Langsung</b>     | <b>32.531.280.156,00</b> | <b>31.487.472.944,00</b> | <b>96,79</b> |

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah serta belanja modal.

Berikut ini akan dibahas uraian tentang anggaran definitif masing-masing kegiatan yang termasuk dalam komponen biaya langsung yaitu:

## I. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

| No | Uraian  | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)           | %Tk Capaian   |
|----|---|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1  | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <b>144.763.056,00</b>    | <b>141.456.905,00</b>    | <b>97,72</b>  |
|    | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah               | 78.576.756,00            | 75.417.417,00            | 95,98         |
|    | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | 66.186.300,00            | 66.039.488,00            | 99,78         |
| 2  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | <b>25.746.615.927,00</b> | <b>25.107.249.091,00</b> | <b>97,52</b>  |
|    | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | 25.207.973.927,00        | 24.571.637.091,00        | 97,48         |
|    | - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 | 538.642.000,00           | 535.612.000,00           | 99,44         |
| 3  | Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah                         | <b>80.306.843,00</b>     | <b>74.878.243,00</b>     | <b>93,24</b>  |
|    | - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 80.306.843,00            | 74.878.243,00            | 93,24         |
| 4  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                              | <b>794.409.000,00</b>    | <b>784.126.037,00</b>    | <b>100,00</b> |

|              |   |                          |                          |              |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
|              | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kanto  | 5.997.300,00             | 4.716.000,00             | 78,64        |
|              | - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 21.205.200               | 19.066.800,00            | 89,92        |
|              | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 66.788.400,00            | 63.426.200,00            | 99,45        |
|              | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   | 64.417.900,00            | 64.060.500,00            | 99,45        |
|              | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 122.313.600,00           | 121.680.000,00           | 99,48        |
|              | - Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 20.253.800,00            | 19.167.000,00            | 94,63        |
|              | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 486.843.000,00           | 485.435.537,00           | 99,71        |
|              | - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 6.589.800,00             | 6.574.000,00             | 99,76        |
| 5            | Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | <b>410.249.000,00</b>    | <b>404.321.700,00</b>    | <b>98,56</b> |
|              | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 364.909.000,00           | 360.416.700,00           | 98,77        |
|              | - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  | 45.340.000,00            | 43.905.000,00            | 96,84        |
| 6            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | <b>2.087.677.624,00</b>  | <b>2.033.182.724,00</b>  | <b>97,39</b> |
|              | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2.200.000,00             | 2.200.000,00             | 100,00       |
|              | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 12.497.000,00            | 10.009.250,00            | 80,09        |
|              | - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00         |
|              | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 2.072.980.024,00         | 2.020.973.474,00         | 97,49        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>29.264.021.450,00</b> | <b>28.545.214.700,00</b> | <b>97,19</b> |

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 29.264.021.450,00** dan realisasi sebesar **Rp. 28.545.714.700,00** atau setara dengan **97,19%** Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan capaian rata-rata di atas 90% sehingga perlu peningkatan serapan di tahun 2024 dan rekomendasinya yaitu berkoordinasi dengan pejabat keuangan tentang syarat-syarat pencairan, perencanaan jika ada perubahan belanja dan internal bidang.



## 2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

| No           | Uraian  | Anggaran (Rp)         | Realisasi (Rp)        | %Tk Capaian  |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1            | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | 439.140.835,00        | 399.828.064,00        | 91,05        |
|              | - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD                      | 439.140.835,00        | 399.828.064,00        | 91,05        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>439.140.835,00</b> | <b>399.828.064,00</b> | <b>91,05</b> |

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 439.140.835, 00** dan realisasi sebesar **Rp. 399.828.064,00** atau setara dengan **91.05%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 39.312.771,00**.

## 3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

| No           | Uraian  | Anggaran (Rp)        | Realisasi (Rp)       | %Tk Capaian  |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1            | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | 55.240.700,00        | 43.960.694,00        | 79,58        |
|              | - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi   | 55.240.700,00        | 43.960.694,00        | 79,58        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>55.240.700,00</b> | <b>43.960.694,00</b> | <b>79,58</b> |

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 55.240.700, 00** dan realisasi sebesar **Rp. 43.960.694,00** atau setara dengan **79.58%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 11.280.006,00** sehingga perlu peningkatan serapan di tahun 2024 dan rekomendasinya yaitu berkoordinasi dengan pejabat keuangan tentang syarat-syarat pencairan, perencanaan jika ada perubahan belanja dan internal bidang.

#### 4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

| No           | Uraian   | Anggaran (Rp)         | Realisasi (Rp)        | %Tk Capaian  |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1            | Pemberin Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi  | 250.000.000,00        | 228.935.899,00        | 91.57        |
|              | - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup | 250.000.000,00        | 228.935.899,00        | 91.57        |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>250.000.000,00</b> | <b>228.935.899,00</b> | <b>91.57</b> |

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 250.000.000,00** dan realisasi sebesar **Rp. 228.935.899,00** atau setara dengan **91.57%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 21.064.101,00**.

#### 5. Program Pengelolaan Persampahan

| No           | Uraian   | Anggaran (Rp)      | Realisasi (Rp)     | %Tk Capaian  |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 1            | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional   | 246.147.805,00     | 227.572.050,00     | 92.45        |
|              | - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | 246.147.805,00     | 227.572.050,00     | 92.45        |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>246.147.805</b> | <b>227.572.050</b> | <b>94.45</b> |

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 246.147.805,00** dan realisasi sebesar **Rp. 227.572.050,00** atau setara dengan **94.45%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 18.575.755,00**. Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan capaian di atas 90,45% atau berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

## 6. Program Pengelolaan Hutan

| No           | Uraian  | Anggaran (Rp)                  | Realisasi (Rp)                 | %Tk Capaian    |
|--------------|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1            | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung   | 109.100.192,00                 | 102.605.000,00                 | 94,05          |
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi</li> <li>- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung</li> </ul> | 87.393.676,00<br>21.706.516,00 | 83.083.500,00<br>19.512.500,00 | 95,07<br>89,93 |
| 2            | Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara   | 297.035.500,00                 | 287.461.100,00                 | 96,78          |
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan</li> </ul>  | 297.035.500,00                 | 287.461.100,00                 | 96,78          |
| 3            | Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m <sup>3</sup> /Tahun  | 38.499.787,00                  | 32.686.900,00                  | 84,90          |
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m<sup>3</sup>/Tahun</li> </ul>  | 38.499.787,00                  | 32.686.900,00                  | 84,90          |
| 4            | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi  | 27.812.600                     | 20.709.000                     | 74,46          |
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan</li> </ul>  | 27.812.600                     | 20.709.000                     | 74,46          |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>472.448.079,00</b>          | <b>443.462.000,00</b>          | <b>87,55</b>   |

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 472.448.079,00** dan realisasi sebesar **Rp. 443.462.000,00** atau setara dengan **87,55%** sehingga perlu peningkatan serapan di tahun 2024 dan rekomendasinya yaitu berkoordinasi

dengan pejabat keuangan tentang syarat-syarat pencairan, perencanaan jika ada perubahan belanja dan internal bidang.

## **7. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**

| No           | Uraian  | Anggaran (Rp)         | Realisasi (Rp)        | %Tk Capaian  |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1            | Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | 698.494.000,00        | 636.152.259,00        | 91.07        |
|              | - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                              | 323.577.100,00        | 299.499.896,00        | 92.56        |
|              | - Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial  | 374.916.900,00        | 336.652.363,00        | 89.79        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>698.494.000,00</b> | <b>636.152.259,00</b> | <b>91.07</b> |

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 698.494.000,00** dan realisasi sebesar **Rp. 636.152.259,00** atau setara dengan **91.07%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 62.341.741,00**.

## 8. Program Pengelolaan Daerah Alisan Sungai (DAS)

| No           | Uraian  | Anggaran (Rp)        | Realisasi (Rp)       | %Tk Capaian  |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1            | Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 35.906.000,00        | 28.948.400,00        | 80,62        |
|              | - Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS   | 35.906.000,00        | 28.948.400,00        | 80,62        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>35.906.000,00</b> | <b>28.948.400,00</b> | <b>80,62</b> |

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 35.906.000,00** dan realisasi sebesar **Rp. 28.948.400,00** atau setara dengan **80,62%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 6.957.600,00**. Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan capaian 80,62% sehingga perlu peningkatan serapan di tahun 2024 dan rekomendasinya yaitu berkoordinasi dengan pejabat keuangan tentang syarat-syarat pencairan, perencanaan jika ada perubahan belanja dan internal bidang.

## II. UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

### 9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

| No | Uraian   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | %Tk Capaian |
|----|--|---------------|----------------|-------------|
| 1  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | 380.532.712   | 346.900.323    | 100,00      |
|    | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.994.800     | 2.994.800      | 100,00      |
|    | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 214.167.060   | 191.074.000    | 89,22       |
|    | - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | 32.873.200    | 30.459.600     | 92,66       |
|    | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | 16.287.800    | 15.527.200     | 95,33       |

|              |   |                    |                    |              |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------|
|              | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                     | 2.164.386          | 2.122.686          | 98,07        |
|              | - Penyediaan Bahan/Material                                     | 62.300.166         | 57.416.900         | 92,16        |
|              | - Fasilitasi Kunjungan Tamu                                     | 8.250.000          | 8.125.000          | 98,48        |
|              | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 41.495.300         | 39.180.500         | 94,42        |
| 2            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            | 83.602.700         | 81.266.637         | 96,75        |
|              | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik       | 31.911.900         | 30.266.637         | 94,84        |
|              | - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | 51.690.800         | 51.000.000         | 98,66        |
| 3            | Kepegawaian Perangkat Daerah                                    | 25.000.000,00      | 25.000.000,00      | 100,00       |
|              | - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 25.000.000,00      | 25.000.000,00      | 100,00       |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>489.135.412</b> | <b>453.167.323</b> | <b>92,65</b> |

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 489.135.412,00** dan realisasi sebesar **Rp. 453.167.323,00** atau setara dengan **92,65%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 35.968.089,00**. Terdapat satu sub kegiatan yang serapan anggarannya dibawah 90% pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor . Adapun tindaklanjutnya adalah serapan anggaran yang lebih baik lagi di tahun 2024 sehingga rekomendasinya adalah PPTK berkoordinasi aktif dengan internal bidang, pejabat keuangan dan perencanaan.

### **III. UPTD KPHP UNIT I Karimun**

#### **10. Program Pengelolaan Hutan**

| <b>No</b> | <b>Uraian</b>   | <b>Anggaran (Rp)</b> | <b>Realisasi (Rp)</b> | <b>%Tk Capaian</b> |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1         | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | <b>37.284.200,00</b> | <b>15.760.600,00</b>  | <b>38,29</b>       |
|           | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 2.000.000            | 0                     | 0                  |
|           | - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | 2.494.400            | 2.464.000             | 98,78              |
|           | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | 13.714.800           | 10.650.600            | 77,66              |
|           | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | 830.000              | 0                     | 0                  |
|           | - Penyediaan Bahan/Material   | 1.475.000            | 1.200.000             | 81,36              |
|           | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | 14.130.000           | 1.446.000             | 10,23              |

|              |  |                      |                      |              |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 2            | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | <b>35.792.500,00</b> | <b>33.074.750,00</b> | <b>91,72</b> |
|              | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | 16.042.500           | 13.654.750           | 85,12        |
|              | - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | 19.750.000           | 19.420.000           | 98,33        |
| 1            | Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung      | 4.500.000,00         | 4.500.000,00         | 100,00       |
|              | - Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH                             | 4.500.000,00         | 4.500.000,00         | 100,00       |
| 2            | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | 6.179.000,00         | 6.179.000,00         | 100,00       |
|              | - Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                        | 6.179.000,00         | 6.179.000,00         | 100,00       |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>83.755.700,00</b> | <b>59.514.350,00</b> | <b>71,06</b> |

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 83.755.700,00** dan realisasi sebesar **Rp. 59.514.350,00** atau setara dengan **71,06%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 24.241.350**. ada beberapa sub kegiatan yang tidak terserap secara maksimal yaitu : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Adapun tindaklanjutnya adalah serapan anggaran yang lebih baik lagi di tahun 2024 sehingga rekomendasinya adalah PPTK berkoordinasi aktif dengan internal bidang, pejabat keuangan dan perencanaan.

## IV. UPTD KPHL II BATAM

### 11. Program Pengelolaan Hutan

| No | Uraian   | Anggaran (Rp)       | Realisasi (Rp)      | %Tk Capaian   |
|----|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1  | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | <b>39.487.455</b>   | <b>37.846.050</b>   | <b>92,55</b>  |
|    | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor    | 2.003.200           | 1.672.000           | 83,47         |
|    | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         | 5.335.500           | 4.880.000           | 91,46         |
|    | - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                    | 2.496.100           | 202.100             | 80,97         |
|    | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                     | 15.014.800          | 15.002.450          | 99,92         |
|    | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                            | 911.700             | 870.000             | 95,43         |
|    | - Penyediaan Bahan/ Material   | 919.155             | 864.500             | 94,05         |
|    | - Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 2.772.000           | 2.688.000           | 96,97         |
|    | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 10.035.000          | 9.848.000           | 98,14         |
| 2  | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah          | <b>41.080.000</b>   | <b>40.020.832</b>   | <b>98,24</b>  |
|    | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       | 1.000.000           | 1.000.000           | 100           |
|    | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              | 19.830.000          | 19.270.832          | 97,18         |
|    | - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                    | 20.250.000          | 19.750.000          | 97,53         |
| 3  | Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung | <b>2.700.000,00</b> | <b>2.700.000,00</b> | <b>100,00</b> |

|              |   |                     |                      |               |
|--------------|---|---------------------|----------------------|---------------|
|              | - Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHL Unit II Batam)      | 2.700.000,00        | 2.700.000,00         | 100,00        |
| 2            | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi    | <b>5.250.000,00</b> | <b>5.250.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|              | - Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHL Unit II Batam) | 5.250.000,00        | 5.250.000,00         | 100,00        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>88.517.45500</b> | <b>85.816.882,00</b> | <b>96,95</b>  |

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 88.517.45500,00** dan realisasi sebesar **Rp. 85.816.882,00** atau setara dengan **96,95%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 2.700.573**. Sebagian sub kegiatan serapan anggaran dibawah 85% yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Adapun tindaklanjutnya adalah serapan anggaran yang lebih baik lagi di tahun 2024 sehingga rekomendasinya adalah PPTK berkoordinasi aktif dengan internal bidang, pejabat keuangan dan perencanaan.

## V. UPTD KPHP UNIT III LINGGA

### 12. Program Pengelolaan Hutan

| No | Uraian   | Anggaran (Rp)     | Realisasi (Rp)    | %Tk Capaian  |
|----|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1  | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah            | <b>32.914.676</b> | <b>20.562.400</b> | <b>79,60</b> |
|    | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                     | 17.405.276        | 10.848.000        | 62,33        |
|    | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan            | 825.000           | 825.000           | 100          |
|    | - Penyediaan Bahan/Material                            | 1.497.400         | 1.497.400         | 100          |
|    | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 13.187.000        | 7.392.000         | 56,06        |

|              |   |                      |                      |              |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 2            | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | 1.311.485            | 754.680              | 57,54        |
|              | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                     | 1.311.485            | 754.680              | 57,54        |
| 3            | Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan provinsi           | 0                    | 0                    | 0            |
|              | - Penyediaan dan pemeliharaan sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHL Unit II Batam) | 0                    | 0                    | 0            |
| 4            | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                            | 0                    | 0                    | 0            |
|              | - Pencegahan dam Pembatasan kerusakan Hutan (UPTD KPHL Unit II Batam)                         | 0                    | 0                    |              |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>34.226.161,00</b> | <b>21.317.080,00</b> | <b>68,57</b> |

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 34.226.161,00** dan realisasi sebesar **Rp. 21.317.080** atau setara dengan **68,57%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 12.909.081**. ada beberapa sub kegiatan yang serapan anggaran belum maksimal dibawah 65% yaitu : Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Adapun tindaklanjutnya adalah serapan anggaran yang lebih baik lagi di tahun 2024 sehingga rekomendasinya adalah PPTK berkoordinasi aktif dengan internal bidang, pejabat keuangan dan perencanaan.

## VI. UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG

### 13. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

| No           | Uraian  | Anggaran (Rp)        | Realisasi (Rp)       | %Tk Capaian  |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1            | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah               |                      |                      |              |
|              | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor            | 12.794.503,00        | 12.685.100,00        | 99,14        |
|              | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                        | 28.075.800,00        | 27.280.750,00        | 97,17        |
|              | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | 15.530.000,00        | 15.134.000,00        | 97,45        |
| 2            | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah               |                      |                      |              |
|              | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 29.205.600           | 28.857.500           | 98,81        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>85.605.903,00</b> | <b>83.957.350,00</b> | <b>98,07</b> |

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 85.605.903,00** dan realisasi sebesar **Rp. 83.957.350,00** atau setara dengan **98,07%**. dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 1.648.553**. Seluruh sub kegiatan anggarannya terserap diatas 95 % sehingga serapan perlu di pertahankan atau di tingkatkan untuk tahun 2024.

## VII. UPTD KPHP UNIT V NATUNA

### 14. Program Pengelolaan Hutan

| No | Uraian  | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | %Tk Capaian |
|----|---|---------------|----------------|-------------|
| 1  | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                         |               |                |             |
|    | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 2.021.000     | 560.000        | 27,71       |
|    | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | 5.241.600     | 3.358.150      | 64,07       |
|    | - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | 2.503.300     | 2.417.000      | 96,55       |
|    | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | 13.246.100    | 12.698.200     | 95,86       |
|    | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | 984.300       | 900.000        | 91,44       |
|    | - Penyediaan Bahan/Material   | 1.499.955     | 1.454.250      | 96,95       |
|    | - Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 4.950.000     | 4.406.000      | 89,01       |
|    | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | 14.226.000    | 5.756.170      | 40,46       |
| 2  | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       |               |                |             |
|    | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | 1.000.000     | 1.000.000      | 100         |
|    | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | 20.074.400    | 9264088        | 46,15       |
|    | - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                 | 69.786.000    | 65.716.500     | 94,17       |

|              |   |                    |                    |              |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 3            | Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung      |                    |                    |              |
|              | - Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHL Unit V Natuna)            | 2.900.656          | 2.756.800          | 95,04        |
| 4            | Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi |                    |                    |              |
|              | - Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan                                 | 5.388.604          | 5.267.150          | 97,75        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>143.821.915</b> | <b>115.554.308</b> | <b>80.35</b> |

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 143.821.915,00** dan realisasi sebesar **Rp. 115.554.308,00** atau setara dengan **80,35%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 28.267.607,00**. Ada beberapa sub kegiatan yang tidak terserap secara maksimal atau dibawah 65% yaitu : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Adapun tindaklanjutnya adalah serapan anggaran yang lebih baik lagi di tahun 2024 sehingga rekomendasinya adalah PPTK berkoordinasi aktif dengan internal bidang, pejabat keuangan dan perencanaan.

## VIII. UPTD KPHP UNIT IV KEPULAUAN ANAMBAS

### 15. Program Pengelolaan Hutan

| No | Uraian   | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | %Tk Capaian |
|----|--|---------------|----------------|-------------|
| 1  | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                        |               |                |             |
|    | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.108.700     | 0              | 0           |

|              |   |                    |                    |              |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------|
|              | - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 2.460.100          | 0                  | 0            |
|              | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 9.392.000          | 0                  | 0            |
|              | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   | 2.262.956          | 0                  | 0            |
|              | - Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 4.920.000          | 0                  | 0            |
|              | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 14.826.000         | 8.756.000          | 59,06        |
| 2            | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   |                    |                    |              |
|              | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 999.100            | 0                  | 0            |
|              | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                       | 19.324.200         | 18127900           | 93,81        |
|              | - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 80.000.800         | 80.000.000         | 99,99        |
| 3            | Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung                          |                    |                    |              |
|              | - Penyediaan dan pemeliharaan sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP Unit VI Anambas) | 2.892.035          | 2.890.635          | 99,95        |
| 4            | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                              |                    |                    |              |
|              | - Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan   | 5.632.850          | 5.631.450          | 99,98        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>144.818.741</b> | <b>115.405.985</b> | <b>90.36</b> |

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 144.818.741,00** dan realisasi sebesar **Rp. 115.405.985,00** atau setara dengan **79.69%** dan terdapat

sisa pagu anggaran **Rp. 29.412.756,00**. Ada beberapa enam sub kegiatan yang tidak terserap dan satu sub kegiatan yang serapannya rendah yaitu 59,06% sehingga perlu adanya tindaklanjut untuk perbaikan serapan di tahun 2024 dan rekomendasinya adalah PPTK berkoordinasi secara aktif dengan internal bidang, pejabat keuangan dan perencanaan.

Tabel 3.2.4 Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Program

| No | Program  | Anggaran                 |                          |                        | Realisasi Fisik (%) | Capaian Kinerja Program (%) |
|----|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|
|    |  | Alokasi (Rp)             | Realisasi (Rp)           | Realisasi Anggaran (%) |                     |                             |
| 1. | Program Perencanaan Lingkungan Hidup   | 439.140.835,00           | 399.828.064,00           | 91,05                  | 100                 | 100                         |
| 2. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  | 30.298.459.592,00        | 29.444.772.943,00        | 97,19                  | 100                 | 100                         |
| 3. | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat  | 250.000.000,00           | 228.935.899,00           | 92,00                  | 100                 | 100                         |
| 4. | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup  | 55.240.700,00            | 43.960.694,00            | 79,58                  | 100                 | 100                         |
| 5. | Program Pengelolaan Persampahan  | 246.147.805,00           | 227.572.050,00           | 92,45                  | 100                 | 100                         |
| 6. | Program Pengelolaan Hutan  | 507.891.224,00           | 487.637.035,00           | 87,55                  | 100                 | 100                         |
| 7. | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | 698.494.000,00           | 636.152.259,00           | 91,07                  | 100                 | 100                         |
| 8. | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)   | 35.906.000,00            | 28.948.400,00            | 80,62                  | 100                 | 100                         |
|    | <b>Jumlah</b>  | <b>32.531.280.156,00</b> | <b>31.488.807.344,00</b> | <b>96,80</b>           | <b>100</b>          | <b>100</b>                  |

Tabel 3.2.5 Realisasi Anggaran Per Sasaran

| Indikator  | Program   | Kegiatan  | Capaian Kinerja Anggaran |                       |              | Capaian indikator (%) |
|--|---|---|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|  |   |   | Anggaran                 | Realisasi             | %            |                       |
| <b>Sasaran ke-1 : Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup</b> |   |   |                          |                       |              |                       |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                                    | 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup   | 1. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi   | <b>439.140.835</b>       | <b>399.828.064</b>    | <b>91,05</b> | 100                   |
|  |   | Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup  | 439.140.835              | 399.828.064           | 91,05        | 100                   |
|  | 2. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup  | 1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi                                     | 55.240.700               | 43.960.694            | 79,58        | 100                   |
|  |   | Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi  | 55.240.700               | 43.960.694            | 79,58        | 100                   |
|  | 3. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Perencanaan Lingkungan Hidup | 1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi  | <b>250.000.000</b>       | <b>228.935.899</b>    | <b>91,57</b> | 100                   |
|  |   | Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 250.000.000              | 228.935.899           | 91,57        | 100                   |
|  | 4. Program Pengelolaan Persampahan  | 2. Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional  | <b>472.448.079</b>       | <b>227.572.050</b>    | <b>92,45</b> | 100                   |
|  |   | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional   | 472.448.079              | 227.572.050           | 92,45        | 100                   |
| <b>Sasaran ke-2 : Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari</b>               |   |   |                          |                       |              |                       |
| Persentase Kontribusi sektor kehutanan terhadap                            | 1. Program Pengelolaan Hutan  | 1. Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung   | <b>109.100.192,00</b>    | <b>102.605.000,00</b> | <b>94,05</b> | 100                   |
|  |   | - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi  | 87.393.676               | 83.083.500            | 95,05        | 100                   |

|      |  |   |                       |                       |              |            |
|------|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|
| PDRB |  | - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung | 21.706.516            | 19.5215.00            | 89,93        | 100        |
|      |  | 2. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara   | <b>297.035.500,00</b> | <b>287.461.100,00</b> | <b>96,78</b> | 100        |
|      |  | - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan                              | 297.035.500           | 287.461.100           | 96,78        | 100        |
|      |  | 3. Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun             | <b>38.499.787,00</b>  | <b>32.686.900,00</b>  | <b>84,90</b> | 100        |
|      |  | - Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun          | 38.499.787            | 38.686.900            | 84,90        | 100        |
|      |  | 4. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                            | <b>27.812.600,00</b>  | <b>20.709.000,00</b>  | <b>74,46</b> | 100        |
|      |  | - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan          | 27.812.600            | 20.709.000            | 74,46        | 100        |
|      |  | <b>5. Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>                          | <b>12.992.691,00</b>  | <b>12.847.435</b>     | <b>98,88</b> | <b>100</b> |
|      |  | Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP UNIT I KARIMUN)                              | 4.500.000             | 4.500.000             | 100          | 100        |
|      |  | Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHL UNIT II BATAM)                               | 2.700.000             | 2.700.000             | 100          | 100        |
|      |  | Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP UNIT V NATUNA)                               | 2.900.656             | 2.756.800             | 95,04        | 100        |
|      |  | Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP UNIT VI ANAMBAS)                             | 2.892.035             | 2.890.635             | 99,98        | 100        |
|      |  | <b>5. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>                     | <b>22.450.454</b>     | <b>22.327.600</b>     | <b>99,45</b> | <b>100</b> |
|      |  | - Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan di KPH (UPTD KPHP UNIT I KARIMUN)                             | 6.179.000             | 6.179.000             | 100          | 100        |
|      |  | - Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan di KPH (UPTD KPHL UNIT II BATAM)                              | 5.250.000             | 5.250.000             | 100          | 100        |
|      |  | - Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan di KPH (UPTD KPHP UNIT III LINGGA)                            | 0                     | 0                     | 0            | 0          |
|      |  | - Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan di KPH (UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TPI)                         | 0                     | 0                     | 0            | 0          |
|      |  | - Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan di KPH (UPTD KPHP UNIT V NATUNA)                              | 5.388.604             | 5.267.150             | 97,75        | 100        |
|      |  | - Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan di KPH (UPTD KPHP UNIT VI ANAMBAS)                            | 5.632.850             | 5.631.450             | 99,98        | 100        |

**Sasaran ke-3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan**

|             |  |  |                       |                       |              |     |
|-------------|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----|
| Nilai SAKIP | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | <b>144.763.056</b>    | <b>141.456.905</b>    | <b>97,72</b> | 100 |
|             |  | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 78.576.756            | 75.417.417            | 94,03        | 100 |
|             |  | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 66.186.300            | 66.039.488            | 99,92        | 100 |
|             |  | 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | <b>25.746.615.927</b> | <b>25.107.249.091</b> | <b>98,52</b> | 100 |
|             |  | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 25207973927           | 24.571.637.091        | 98,53        | 100 |
|             |  | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 538.642.000           | 535.612.000           | 97,69        | 100 |
|             |  | 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah   | <b>794.409.000</b>    | <b>784.126.037</b>    | <b>98,71</b> | 100 |
|             |  | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 5.997.300             | 4.716.000             | 78,64        | 100 |
|             |  | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 21.205.200            | 19.066.800            | 89,92        | 100 |
|             |  | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 66.788.400            | 63.426.200            | 94,97        | 100 |
|             |  | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   | 64.417.900            | 64.060.500            | 99,45        | 100 |
|             |  | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 122.313.600           | 121.680.000           | 99,48        | 100 |
|             |  | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 20.253.800            | 19.167.000            | 94,63        | 100 |
|             |  | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 486.843.000           | 485.435.537           | 99,71        | 100 |
|             |  | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 6.589.800             | 6.574.000             | 99,76        | 100 |
|             |  | 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <b>2.087.677.624</b>  | <b>2.033.182.724</b>  | <b>97,39</b> | 100 |
|             |  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2.200.000             | 2.200.000             | 100          | 100 |
|             |  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 12.497.600            | 10.009.250            | 80,09        | 100 |
|             |  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 2.072.980.024         | 2.020.973.474         | 97,56        | 100 |
|             |  | 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | <b>410.249.000</b>    | <b>404.321.700</b>    | <b>98,56</b> | 100 |
|             |  | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 364.909.000           | 360.416.700           |              | 100 |
|             |  | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 45.340.000            | 43.905.000            | 93,24        | 100 |
|             |  | 6. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | <b>80.306.843</b>     | <b>74.878.243</b>     | <b>93,24</b> | 240 |
|             |  | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN)                    | 80.306.843            | 74.878.243            | 93,24        | 240 |

Secara umum akuntabilitas keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dapat dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau melalui APBD tahun anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar 32.531.280.156,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 31.487.472.944,- atau 96,79% dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 1.043.807.212,-

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu :

1. Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja atas tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang Baik.

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan kedalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang tersedia.

Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang tersedia melalui APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 32.531.280.156,-(Tiga Puluh Dua milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu seratus lima puluh enam Rupiah) dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari, serta Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

## **4.1 Kesimpulan**

Hasil analisis yang telah dilakukan pada Bab 3 dan dengan mempertimbangkan capaian realisasi indikator kinerja, didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang tercakup dalam 8 program, 16 kegiatan dan 35 sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 yang dapat dicapai dengan capaian 106,31 % dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 74,26 atau kategori "Sangat Baik".
2. Sedangkan untuk sasaran meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari dengan indikator Kontribusi Sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Berlaku tercapai 27,13 dengan capaian kinerja 99,74% atau kategori "Baik" dan merupakan angka sementara karena angka tetap belum rilis dari BPS Provinsi Kepulauan Riau dan rilis PDRB sektor Kehutanan Tahun 2023 di akhir bulan Februari 2023.

## **4.2 Saran**

Saran yang dapat diberikan atas kesimpulan hasil analisis pada Bab 3 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau perlu dipertahankan dan tetap meningkatkan performa kinerja agar target akhir periode RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 tetap lebih baik.
2. Perlu dilakukannya pemenuhan anggaran untuk sasaran strategis yang belum tercapai
3. Pendanaan untuk Indikator Kinerja Utama sebaiknya tidak dilakukan refocusing karena mengingat hal tersebut merupakan indikator kinerja kepala Dinas yang membawa nama OPD tersebut.
4. Anggaran untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebaiknya dilakukan review kembali mengingat selama ini anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan persyaratan frekuensi pemantauan yang sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Demikian, semoga laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur Kepulauan Riau selaku Kepala Daerah atau pihak lainnya yang berkepentingan sebagai sumber informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik dalam rangka pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dimasa mendatang.

Tanjungpinang, Februari 2024

Kepala Dinas  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Provinsi Kepulauan Riau,



**HENDRI, S.T**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19710501 200312 1 008